

International Law Making



Agreement on Agriculture*

Konsep (Concept)

Agreement on Agriculture (untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian), adalah sebuah perjanjian internasional yang merupakan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).

Pada Perjanjian ini dibahas mengenai 3 (tiga) pilar utama dalam pertanian, yang meliputi bantuan/dukungan domestik, akses pasar dan subsidi terhadap ekspor. Pilar pertama, bantuan domestik, merupakan bantuan yang terdiri dalam 3 (tiga) kategori. Perjanjian membaginya kedalam "kotak-kotak" (box), yaitu Kotak Hijau, Kotak Oranye, dan Kotak Biru. Kotak Hijau berisikan pembayaran tetap kepada para produsen dalam program lingkungan, selama pembayaran dipasangkan dengan tingkat produksi saat ini. Kotak Oranye mengatur tentang subsidi domestik dimana pemerintah bersepakat untuk mengurangi bukan untuk menghapusnya. Sedangkan Kotak Biru berisikan subsidi yang dapat meningkat tanpa ada batasan, selama pembayaran berkaitan dengan program pembatasan produksi. Sistem bantuan domestik Perjanjian pada saat ini mengijinkan Eropa dan Amerika Serikat untuk menghabiskan sekitar \$380 triliun setiap tahunnya untuk subsidi di bidang pertanian itu sendiri. Mengenai bantuan domestik ini, sering diragukan apakah bantuan seperti ini memang diperlukan dalam melindungi peternakan kecil, tetapi menurut Bank Dunia lebih dari setengah bantuan Uni Eropa dibutuhkan oleh 1% produsen produk pertanian, sementara di Amerika Serikat 70% subsidi tersebut diperlukan oleh 10% produsen yang sebagian besar bergerak

http://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/14-ag.pdf

dibidang agrobisnis. Efek dari subsidi-subsidi ini, adalah membanjirnya pasar global dengan komoditas berharga rendah, menekan harga pasar, dan memotong produsen-produsen di negara-negara miskin.

Pilar kedua, akses terhadap pasar, merujuk kepada pengurangan tarif (atau non-tarif) terhadap perdagangan antar negara-negara anggota WTO. Pada 1995, Perjanjian memerlukan pengurangan tarif rata-rata sebesar:

- 36% pada negara maju, dengan pengurangan tarif minimal sebesar 15% setelah 15 tahun,
- 24% pada negara berkembang, dengan pengurangan tarif minimal sebesar 10% setelah 9 tahun.

Least Developed Countries (LDCs) dikecualikan dari pengurangan tarif ini, tetapi mereka dapat beralih dari halangan non-tarif kedalam bentuk tarif tetap. Proses ini dikenal dengan sebutan tarififikasi, dimana suatu negara mengikatkan diri untuk mengadopsi suatu sistem tarif dengan menciptakan atap batasan tarif yang besarnya tidak dapat naik/meningkat dimasa mendatang.

Pilar ketiga Perjanjian menetapkan pengurangan subsidi ekspor dari negara maju sebesar 35% (berdasarkan nilai barang) atau setidaknya sebesar 21% (berdasarkan volume perdagangan barang). Target pilar ketiga ini dibuat sejak 1995, dan harus tercapai dalam waktu 5 tahun (berakhir pada 2000).

Perjanjian ini memuat kewajiban negara-negara peserta untuk mencapai ketiga pilar tersebut, dan memuat hak-hak negara tersebut, yang antara lain mencakup:

1. Setiap negara berhak untuk mengenakan hambatan tarif impor sebagai bentuk perlindungan bagi produsen pertanian/petani dalam negeri, sepanjang tingkat tarif tersebut tidak melebihi tingkat komitmen tarif yang telah disepakati.
2. Negara berkembang berhak untuk memperdagangkan cadangan pangan untuk keperluan program ketahanan pangan dengan harga yang diatur (*administered prices*); mendistribusikan bantuan pangan yang disubsidi kepada rakyat miskin; memberikan subsidi atau bantuan modal kepada petani dalam negeri untuk meningkatkan teknologi dan produksi pertanian; subsidi kepada petani miskin untuk penyediaan suplai peralatan

pertanian, pupuk dan alat-alat lain yang diperlukan dalam produksi.

Latar Belakang (*Background*)

Perjanjian, sebagai bagian dari perjanjian internasional negara-negara anggota WTO, pertama kali dinegosiasikan pada saat pembahasan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) di Putaran Uruguay. Dilatarbelakangi oleh keinginan negara-negara peserta Perjanjian untuk menciptakan suatu dasar dalam mengawali perubahan perdagangan produk/barang pertanian, sebagaimana sejalan dengan tujuan yang terdapat pada Deklarasi Punta del Este (Deklarasi). Selain itu, menimbang pula tujuan jangka panjang Deklarasi yang sesuai dengan *Mid-Term Review Uruguay Round*, yaitu menciptakan suatu sistem perdagangan produk pertanian yang berorientasi pasar secara adil, dan bahwa suatu proses perubahan harus diawali melalui negosiasi komitmen dalam bentuk dukungan dan perlindungan serta melalui pembentukan dan pelaksanaan peraturan-peraturan GATT. Mengingat lebih jauh bahwa tujuan jangka panjang ini ditujukan untuk tersedianya kemajuan pengurangan bantuan dan perlindungan pertanian, yang berkelanjutan pada waktu yang ditentukan, menghasilkan suatu larangan dan deformasi (dalam bentuk yang benar dan pencegahan) pada pasar perdagangan produk pertanian dunia.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Perjanjian ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai bagaimana suatu negara dapat mengadopsinya, dan bagaimana prosesnya hingga Perjanjian memiliki keberlakuan. Perjanjian ini berlaku pada 1 Januari 1995.

Prinsip Umum (*General Principles*)

Pasal 20 Perjanjian mengatur mengenai kelanjutan proses perubahan, yaitu dengan menyadari bahwa tujuan jangka panjang dalam menciptakan pengurangan bantuan dan perlindungan sebagai akibat dari perubahan yang fundamental, merupakan suatu proses (yang sedang berlangsung dan memakan waktu). Oleh karena itu, negara-negara peserta Perjanjian bersepakat agar proses negosiasi

untuk melanjutkan proses tersebut akan dilakukan 1 tahun sebelum berakhirnya masa implementasi Perjanjian.

Prinsip umum lainnya terdapat pada Pasal 21 ayat 1, yang dikatakan bahwa setiap ketentuan GATT 1994 dan perjanjian perdagangan multilateral lainnya yang terdapat pada Annex 1A dan kesepakatan-kesepakatan WTO lainnya merupakan subyek yang terkandung dalam Perjanjian ini. Pada ayat 2 dikatakan bahwa Annex Perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Materi Pokok (*Main Features*)

1. Pasal 1 mengatur tentang ketentuan umum mengenai definisi istilah yang digunakan dalam Perjanjian. Istilah ini antara lain, *Aggregate Measurement of Support (AMS)*, *basic agricultural product*, *Equivalent Measurement of Support*, dan Total AMS. Pasal 2 mengatur tentang produk pertanian yang menjadi cakupan Perjanjian, dimana hanya dapat diaplikasikan pada produk pertanian yang tercantum pada Annex 1 Perjanjian, yang untuk selanjutnya disebut sebagai produk pertanian.
2. Pasal 3 mengatur tentang konsesi dan komitmen inkorporasi, dimana pada ayat 1 dikatakan bahwa komitmen bantuan domestik dan subsidi ekspor pada Bab IV jadwal setiap negara peserta berisikan komitmen yang membatasi pemberian subsidi dan (komitmen tersebut) merupakan bagian yang terintegrasi dari ketentuan GATT 1994.
3. Pasal 4 mengatur mengenai akses pasar. Perjanjian menyebutkan bahwa konsesi akses pasar berkaitan dengan keterikatan dan pengurangan tarif, dan kepada komitmen-komitmen akses pasar lain sebagaimana akan dispefifikasikan dalam Perjanjian. Negara peserta berkewajiban mengatur, memberikan pilihan, atau mengalihkan pada tindakan lain yang dibutuhkan dalam mengalihkan bentuk bea tertentu, seperti larangan impor kuantitatif, pajak impor yang bervariasi, harga impor minimal, kecuali ditentukan lain pada Pasal 5 dan Annex 5.
4. Ketentuan mengenai pengamanan khusus diatur pada Pasal 5. Ayat 1 Pasal ini mengatakan bahwa tanpa mengecualikan ketentuan pada ayat 1b pasal 2 GATT 1994, setiap negara

peserta dapat menerapkan ketentuan ayat 5 dan 6 dibawah ini, dalam hal yang berkaitan dengan impor produk pertanian, dengan mempertimbangkan pula ayat 2 dan 4 Perjanjian ini yang dialihkan kedalam pajak biasa, apabila:

- a. volume impor produk yang memasuki wilayah pajak negara peserta yang memberikan konsesi dalam tahun yang melebihi tingkat pemicu yang berkaitan pada kesempatan akses pasar yang ada, sebagaimana ditentukan pada ayat 4.
- b. harga yang tercantum pada saat impor produk tersebut dapat memasuki wilayah pajak negara peserta yang memberikan konsesi, sebagaimana ditentukan berdasarkan harga impor pengiriman terkait dengan nilai mata uang domestik, jatuh dibawah harga pemicu, sama dengan harga rata-rata berdasarkan referensi harga sejak 1986-1988 untuk produk yang dimaksud.

Ayat 2 mengatur tentang impor dibawah komitmen akses minimal dan pada saat ini, dibentuk sebagai bagian dari konsesi merujuk pada ayat 1 diatas, seharusnya dihitung sebagai tujuan dari menentukan volume impor yang dibutuhkan pada ayat 4, tetapi impor dibawah komitmen tersebut tidak memberikan dampak dengan diterapkannya bea tambahan sebagaimana ditentukan pada ayat 4 dan 5 dibawah. Ayat 3 mengatur tentang produk pertanian yang diperdagangkan dan dikenakan bea tambahan sebelum diterapkannya ketentuan pada ayat 4, dikecualikan dari tambahan bea yang dimaksud, disediakan bahwa produk-produk tersebut dapat diperhitungkan masuk kedalam volume impor produk untuk tahun berikutnya.

Ayat 4 mengatur tentang bea tambahan yang dikenakan hanya berlaku hingga akhir tahun, dan hanya dapat dipajakkan pada tingkat yang tidak melewati satu per tiga tingkat pajak biasa. Level pemicu harus ditentukan berdasarkan kesempatan akses pasar yang didefinisikan sebagai impor, persentase konsumsi domestik selama 3 tahun. Pada semua kasus, pajak tambahan dapat diterapkan tahun kapan pun, ketika volume impor absolut produk pertanian yang dimaksud memasuki wilayah pajak negara peserta yang

memberikan konsesi, melebihi jumlah tingkat pemicu yang ditentukan, dikalikan dengan jumlah rata-rata impor selama 3 tahun.

Ayat 5 menyebutkan bahwa pajak tambahan yang ditentukan harus berdasarkan jadwal berikut:

- a. jika perbedaan antara harga impor pengiriman yang ditentukan dalam mata uang domestik dan harga pemicu yang ditentukan lebih rendah atau sama dengan 10% harga pemicu, maka tidak dapat dikenakan pajak tambahan;
 - b. jika perbedaan antara harga impor dan harga pemicu lebih besar 10% tetapi lebih rendah atau sama dengan 40% harga pemicu, pajak tambahan dikenakan sebesar 30% untuk jumlah perbedaan yang melebihi 10%;
 - c. jika perbedaan tersebut lebih besar dari 40% tetapi lebih rendah atau sama dengan 60% harga pemicu, maka pajak tambahan sama dengan 50% untuk jumlah perbedaan yang melebihi 40% tersebut, ditambah dengan pajak tambahan yang ditentukan pada sub b;
 - d. jika perbedaan tersebut lebih besar dari 60% tetapi lebih rendah atau sama dengan 75% harga pemicu, maka pajak tambahan sama dengan 70% untuk jumlah perbedaan yang melebihi 60% tersebut, ditambah dengan pajak tambahan yang ditentukan pada sub b dan c;
 - e. jika perbedaan tersebut lebih besar dari 75% dari harga pemicu, maka pajak tambahan sama dengan 90% untuk jumlah perbedaan yang melebihi 75% tersebut, ditambah dengan pajak tambahan yang ditentukan pada sub b, c, dan d.
5. Pasal 6 mengatur mengenai komitmen bantuan petani domestik, yang pada dasarnya merupakan komitmen pengurangan bantuan kepada petani dalam negeri. Pelaksanaan komitmen ini hanya terdapat dalam termin *Total Aggregate Measurement of Support*, dan tahap komitmen mengikat final dan tahunan. Bentuk pengurangan bantuan terhadap petani domestik ini tidak dapat diterapkan/dikecualikan terhadap produsen pertanian/petani yang bukan merupakan subyek komitmen, karena mereka termasuk kedalam kualifikasi sebagaimana

disebutkan dalam Annex 2 Perjanjian (Pasal 7). Pasal 8 mengatur tentang Komitmen Persaingan Ekspor dimana setiap negara peserta bersepakat untuk tidak menyediakan subsidi ekspor kecuali sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian (Pasal 8). Pasal 9 mengatur tentang Komitmen Subsidi Ekspor, yaitu setiap negara anggota WTO, baik negara maju dan berkembang, berhak untuk memberikan subsidi kepada produsen pertanian/petani dalam negeri selama hal tersebut tidak mempengaruhi perdagangan, atau tidak diberikan secara langsung kedalam biaya produksi (*green subsidy*). Ayat 1 Pasal 9 menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam subyek yang dapat diberikan subsidi ekspor adalah ketentuan pemerintah termasuk segala pembiayaan kepada bidang industri, dan produsen produk pertanian, kepada dewan pemasaran; penjualan ekspor pemerintah yang memiliki harga lebih rendah dari harga produk sejenis untuk pasar dalam negeri; pembiayaan dalam ekspor hasil pertanian yang secara tidak langsung berasal dari pemerintah. Pengecualian dari pasal ini terdapat pada Pasal 10, yaitu bila ekspor yang dimaksud tidak terdapat pada Ayat 1 Pasal 9, dan bila dengan dilaksanakannya komitmen pemberian subsidi ekspor dapat mengakibatkan terpotongnya komitmen pemberian subsidi. Pasal 10 mengatur tentang pencegahan dari terpotongnya komitmen pemberian subsidi, antara lain dengan tidak memberikan subsidi ekspor kepada jenis ekspor yang tidak tercantum pada Pasal 9 Ayat 1.

6. Pasal 11 mengatur tentang produk pertanian terpadu. Pasal 12 mengatur tentang larangan ekspor. Pada Ayat 1 dikatakan bahwa setiap negara peserta yang memiliki larangan ekspor makanan tertentu, sebagaimana dikatakan pada paragraf 2(a) Pasal XI GATT 1994, maka negara tersebut harus mempertimbangkan dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari diberlakukannya larangan tersebut, terutama terhadap negara pengimpor makanan tersebut, selain itu negara yang memberlakukan larangan tersebut wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Komite Pertanian (*Committee on Agriculture*), mengenai tenggang waktu, dan alasan dilakukan larangan tersebut. Ketentuan ini

tidak dapat diterapkan kepada negara berkembang manapun, kecuali langkah ini diambil oleh negara berkembang yang merupakan pengeksport jaringan makanan yang dimaksud (Ayat 2).

7. Pasal 14 mengatur tentang *Sanitary and Phytosanitary Measures*, yang merujuk pada pelaksanaan *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*. Pasal 15 mengatur tentang Perlakuan Khusus dan Membedakan (*Special and Differential Treatment*) yang hanya dapat berlaku kepada negara-negara berkembang. Perlakuan ini menyangkut hal-hal:
 - a. Pemberian pengecualian, dengan batas waktu tertentu dan jangka waktu lebih lama dalam melaksanakan kewajiban negara peserta sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian, yaitu meningkatkan akses terhadap pasar, melakukan pengurangan subsidi ekspor dan mengurangi pemberian bantuan kepada produsen dalam negeri.
 - b. Kefleksibilitas dalam prosedur pelaksanaan kewajiban.
 - c. Pemberian bantuan teknis.
 - d. Perlindungan industri dalam negeri diberikan merujuk pada ketentuan *Safeguard and Countervailing Measures* dan *Anti Dumping*.Pelaksanaan perlakuan khusus ini diawasi oleh Komite Pertanian.
8. Pada Pasal 17 dikatakan bahwa untuk tercapainya tujuan Perjanjian, maka dibentuk Komite Pertanian, yang antara lain berfungsi memantau kemajuan dalam pelaksanaan Perjanjian, disesuaikan dengan komitmen yang telah disepakati dalam Putaran Uruguay.

Mekanisme Khusus (*Special Mechanisms*)

Perjanjian ini tidak terpisah dari 5 Annexnya, yaitu mengenai:

1. Annex 1: Cakupan produk pertanian yang menjadi subyek pengurangan subsidi.

Pada Annex ini beberapa produk pertanian yang termasuk dalam cakupan Perjanjian antara lain adalah produk perikanan, minyak, mannitol, sorbitol, wool dan kulit hewan.

2. Annex 2: Pemberian bantuan kepada dalam negeri, sebagai dasar pengecualian dari komitmen pengurangan subsidi.
Dikecualikan hanya pada ekspor yang dapat mengganggu volume perdagangan, dan bila bantuan terhadap kepada dalam negeri ini berasal dari program pemerintah yang dibiayai oleh publik.
3. Annex 3: Pemberian bantuan kepada dalam negeri, penghitungan teknis dari *Aggregate Measurements of Support*
4. Annex 4: Pemberian bantuan kepada dalam negeri, penghitungan teknis dari *Equivalent Measurements of Support*
5. Annex 5: Perlakuan khusus

Pengawasan (*Authority*)

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 dan 18, bahwa untuk tercapainya tujuan dari Perjanjian ini, maka dibentuk Komite Pertanian. Komite ini memiliki beberapa fungsi antara lain:

- a. memantau kemajuan dalam pelaksanaan Perjanjian, disesuaikan dengan komitmen yang telah disepakatai dalam Putaran Uruguay,
- b. mengawasi pelaksanaan perlakuan khusus,
- c. mengumpulkan dan menyimpan pemberitahuan yang diberikan oleh setiap negara peserta,
- d. menyiapkan dokumen tersebut apabila diperlukan oleh Sekretariat.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Berdasarkan Pasal 19 mengenai Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa, dikatakan bahwa ketentuan Pasal XXII dan XXIII GATT 1994, sebagaimana diterapkan oleh *Dispute Settlement Understanding*, diterapkan pula dalam konsultasi dan penyelesaian sengketa dalam Perjanjian ini.

Peraturan Terkait (*Related Regulations*)

Adapun peraturan yang terkait dengan Perjanjian ini adalah:

1. *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*
2. *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.*

(Sindy Fathan, SH)

Plant Protection Agreement for the Asia and Pacific Region*

Konsep (Concept)

Plant Protection Agreement for the Asia and Pacific Region (untuk selanjutnya disebut Perjanjian) merupakan perjanjian yang disepakati dalam rangka melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Pasal III *International Plant Protection Convention* 1951 (IPPC). Tidak semua peserta IPPC mengadopsi Perjanjian yang ditandatangani pada 27 Februari 1956 ini. Perjanjian ini ditujukan untuk melakukan tindakan nyata dalam mencegah masuk dan menyebarnya tanaman dan hama yang merusak di wilayah Asia-Pasifik.

Latar Belakang (Background)

Perjanjian ini disepakati pada pertemuan Dewan *Food and Agricultural Organization* (FAO) yang ke-23 di Roma. Dilatarbelakangi oleh perlunya diadakan perjanjian tambahan sebagai bentuk pelengkap Pasal III IPPC. Perjanjian ini memiliki 27 negara peserta. Pada awalnya, Perjanjian ini berjudul *Plant Protection Agreement for the South-East Asia and Pacific Region*, sebelum diamandemen pada pertemuan Dewan FAO yang ke-75 pada 1979.

Perjanjian ini telah diamandemen sebanyak 5 kali. Amandemen pertama mengenai perubahan definisi umum wilayah Asia Tenggara dan Pasifik (*"the region"*). Definisi *"the region"* pada awalnya terdiri dari wilayah Asia tenggara bagian timur dari perbatasan barat Pakistan dan selatan pegunungan Himalaya, perbatasan selatan Cina dan perbatasan utara Filipina, dan seluruh wilayah Laut Pasifik, Laut Cina Selatan dan laut Hindia yang terletak secara keseluruhan maupun sebagian di daerah yang tercakup pada 100° bujur timur dan 165° bujur barat, serta 20° lintang selatan dan 15° lintang utara, tetapi terkecuali wilayah Australia. Amandemen pertama ini mengubah definisi *"the region"*

* <http://www.fao.org/Legal/treaties/006t-e.htm>

menjadi seluruh wilayah Asia, bagian timur perbatasan barat Pakistan dan perbatasan barat Cina dan bagian selatan perbatasan utara Cina dan bagian barat perbatasan timur Cina, bersama dengan seluruh wilayah di Laut Pasifik, Laut Cina Selatan dan laut Hindia yang terletak seluruh atau sebagian di daerah yang memiliki 100° bujur timur, 45° lintang selatan, 130° bujur barat, 38° bujur utara terhadap titik pertemuan dengan pantai timur Cina. Definisi ini diubah setelah negara peserta Perjanjian menyepakati definisi "*the region*" yang baru pada pertemuan Dewan FAO yang ke-49 pada November 1967. Amandemen pertama ini berlaku sejak 16 Agustus 1969, yaitu pada hari ke-30 dua pertiga negara peserta Perjanjian menyatakan penerimaan terhadap amandemen tersebut. Amandemen kedua yaitu mengenai perubahan judul Perjanjian. Amandemen ketiga kembali mengenai perubahan definisi *the region*. Amandemen keempat mengenai kewajiban pembiayaan pada Pasal II, III dan IV. Amandemen ketiga dan keempat ini disepakati pada pertemuan Dewan FAO yang ke-84 pada 1983. Amandemen terakhir, yang disepakati pada pertemuan Dewan FAO ke-117 pada November 1999, mengenai perubahan Perjanjian dalam rangka menyesuaikan tujuan Perjanjian dengan naskah IPPC yang baru (yang telah diamandemen) dan *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary measures* (SPS Agreement), menyesuaikan kebutuhan modern dalam rangka melindungi tanaman, beserta memperkuat kedudukan dan fungsi *Asia and Pacific Plant Protection Committee* (APPPC). Dewan FAO bersepakat bahwa amandemen ini tidak melibatkan kewajiban baru bagi para negara peserta Perjanjian, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal IX.4 Perjanjian, maka amandemen terakhir ini baru berlaku kepada seluruh negara peserta, 30 hari setelah dua pertiga negara peserta perjanjian menyatakan penerimaannya.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Berdasarkan Pasal XI, Perjanjian berlaku secepatnya setelah tiga negara menjadi peserta Perjanjian ini, baik melalui penandatanganan, atau penandatanganan sebagai subyek ratifikasi yang diikuti oleh ratifikasi di negaranya. Perjanjian ini berlaku pada 2 Juli 1956. Kemudian berdasarkan ketentuan paragraf 2 Pasal XI,

Perjanjian telah didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 20 Juli 1956, dibawah nomor 1963. Negara peserta Perjanjian berjumlah 27 negara.¹

Prinsip Umum (*General Principles*)

Pasal VIII Perjanjian mengatur bahwa tidak satupun ketentuan pada IPPC mempengaruhi hak dan kewajiban negara peserta Perjanjian yang bukan merupakan negara peserta IPPC.

Materi Pokok (*Main Features*)

Perjanjian ini memiliki 12 Pasal dan 2 *Appendix*. Adapun materi pokok dari Perjanjian ini sebagai berikut:

- Pasal I mengatur tentang definisi umum definisi yang dipaparkan pada Pasal ini adalah definisi "*the region*" (wilayah cakupan Perjanjian); definisi tanaman, yaitu setiap species tanaman atau bagian tanaman baik yang hidup maupun mati; definisi "*territory*" (wilayah negara atau negara bagian yang termasuk dalam wilayah cakupan Perjanjian); definisi Organisasi, yaitu FAO; dan definisi Komite, yaitu APPPC yang dibentuk berdasarkan Pasal II Perjanjian.
- Pasal II mengatur tentang Komite Regional. Pada Ayat 1 dikatakan bahwa negara peserta bersepakat untuk membentuk Komite regional, yang disebut sebagai APPPC. APPPC ini memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menentukan prosedur dan pengaturan yang diperlukan dalam implementasi Perjanjian ini, serta membuat rekomendasi bagi negara peserta Perjanjian berkaitan dengan implementasi Perjanjian tersebut;
 - b. memeriksa kembali setiap laporan yang diserahkan oleh negara peserta, mengenai kemajuan dibidang pengimplementasian Perjanjian;

¹ Adapun ke 27 negara ini adalah sebagai berikut: Australia, Banglades, Kamboja, Cina, Republik Rakyat Demokrat Korea, Fiji, Perancis (untuk Polynesia), India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nu Gini, Filipina, Republik Korea, Samoa (Barat), Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Viet Nam.

- c. memberikan pertimbangan mengenai masalah yang membutuhkan kerjasama dan kegiatan *mutual assistance* antar regional.

Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan perwakilan di APPPC dan memiliki satu hak suara. Kuorum terdiri dari suara mayoritas negara peserta. Keputusan-keputusan APPPC diambil dari mayoritas suara yang diberikan, kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian. APPPC harus mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal FAO setelah melakukan konsultasi dengan Ketua APPPC. Direktur Jenderal FAO harus mengadakan pertemuan dengan APPPC setidaknya 2 kali setahun atau ketika diminta oleh sepertiga negara peserta Perjanjian (Ayat 3). Ayat 4 menyatakan bahwa APPPC harus memilih seorang ketua dari delegasi negara peserta Perjanjian, untuk menjabat dalam periode 2 tahun, atau hingga pertemuan pertama APPPC diadakan setelah habisnya masa jabatan 2 tahun. Ketua APPPC dapat dipilih kembali. Seluruh pengeluaran dikeluarkan oleh delegasi negara peserta dalam menghadiri pertemuan APPPC, ditentukan dan dibiayai oleh pemerintahan negara masing-masing (Ayat 5). Direktur Jenderal FAO harus menunjuk dan membentuk Sekretaris APPPC dari staf FAO, dan segala pengeluaran Sekretaris APPPC ditentukan dan dibiayai seluruhnya oleh FAO (Ayat 5). APPPC menentukan dan membentuk peraturan dan prosedurnya sendiri (Ayat 6).

- Pasal III mengatur tentang langkah-langkah berkaitan dengan impor tanaman dari negara diluar wilayah Perjanjian. Untuk tujuan pencegahan pengenalan dan masuknya tanaman dan hama yang merusak sebagaimana tercantum dalam *Appendix A* kedalam wilayah Perjanjian, setiap negara peserta harus memberikan dukungan dan langkah efektif berkaitan dengan import tanaman apapun, termasuk dalam pengepakan dan penyediaan wadah, serta pengepakan tanaman asli dari dalam maupun luar wilayah Perjanjian. Negara peserta wajib mengambil langkah efektif seperti melakukan pelarangan, sertifikasi, inspeksi, disinfeksi, karantina dan penghancuran atau

langkah-langkah lain yang direkomendasikan oleh APPPC, dengan dasar pertimbangan ketentuan Pasal V dan VI IPPC.

- Pasal IV mengatur tentang langkah dalam mengecualikan penyakit daun karet *Hevea* Amerika Selatan dari wilayah Perjanjian. Disebutkan bahwa dengan memandang pentingnya industri karet *Hevea* di wilayah Perjanjian, dan bahaya dari masuknya penyakit daun karet *Hevea* Amerika Selatan (*Dothidella ulei*), negara peserta harus mengambil langkah sebagaimana ditentukan dalam *Appendix B* Perjanjian.
- Pada Pasal V berisikan ketentuan yang berkaitan dengan perpindahan tanaman antar wilayah Perjanjian. Dikatakan bahwa untuk tujuan pencegahan penyebaran tanaman dan hama perusak di wilayah Perjanjian, setiap negara peserta harus memberikan tindakan dan mengambil langkah efektif, dalam kaitannya dengan import tanaman, dengan memperhatikan pengepakan dan penyediaan wadah, serta pengepakan tanaman asli yang berasal dari dan antar wilayah Perjanjian. Negara peserta wajib mengambil langkah efektif seperti melakukan pelarangan, sertifikasi, inspeksi, disinfeksi, karantina dan penghancuran atau langkah-langkah lain yang direkomendasikan oleh APPPC, menambahkan seluruh tindakan yang telah diadopsi oleh setiap negara peserta Perjanjian.
- Pasal VI mengatur tentang pengecualian umum, yaitu tidak berlakunya Perjanjian ini terhadap tanaman dan produk hasil tanaman, kecuali tanaman atau produk hasil tanaman tersebut secara eksplisit merupakan subyek tindakan/langkah yang ditentukan dalam Perjanjian atau yang direkomendasikan oleh APPPC, antara lain:
 - a. tanaman yang diimport untuk pangan dan untuk tujuan analisa, obat atau manufaktur;
 - b. bibit tanaman, sayuran, dan bunga-bunga tahunan, dua tahunan, atau permanen yang pada pokoknya merupakan tanaman berkarakter herbal;
 - c. segala produk hasil tanaman.

Mekanisme Khusus (*Special Mechanism*)

Perjanjian ini memiliki 2 mekanisme khusus yang tercantum dalam 2 *Appendix*nya, yaitu:

- *Appendix A*

Sebagaimana dikatakan dalam Pasal III mengenai langkah yang perlu diambil berkaitan dengan impor tanaman dari luar wilayah Perjanjian, bahwa pada *Appendix* ini terdapat daftar tanaman dan hama yang dapat merusak. Beberapa tanaman, penyakit, dan hama perusak tersebut antara lain: tanaman cokelat (hama *Sahlbergella singularis* hagl, *Monilia roreri* Cif, dan virus), tanaman jeruk (hama *Anastrepha*, *Deuterophoma tracheiphila*), tanaman kopi (hama *tabor*, *Bunting*, *Planococcus henryae*), tanaman kapuk (virus dan hama *Anthonomus spp*), tanaman karet (hama *Dothidella ulei*).

- *Appendix B*

Khusus untuk langkah pengecualian penyakit daun karet *Hevea* Amerika Selatan dari wilayah Perjanjian, *Appendix B* ini menyediakan definisi tambahan mengenai wilayah tropis Amerika, dan otoritas yang berwenang setiap negara peserta. Setiap Negara Peserta harus memberikan larangan impor kedalam wilayahnya, tanaman atau bagian tanaman bergenus *Hevea* (karet) dari luar wilayah Perjanjian, kecuali:

- a. pentingnya impor tanaman tersebut untuk tujuan sains;
- b. terdapat izin tertulis dari otoritas yang berwenang negara pengimpor dan pengeksport tanaman tersebut;
- c. tanaman tersebut telah dibersihkan dari infeksi hama dan bebas dari tanah negara asal, disertai dengan sertifikasi dari otoritas negara yang berwenang dari negara pengimpor dan pengeksport tanaman tersebut;
- d. setiap pengiriman ditujukan dan diterima oleh otoritas yang berwenang wilayah pengimpor.

Otoritas dan Pengawasan (*Authority and Monitoring*)

Pengawasan langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh APPPC (berdasarkan Pasal II Perjanjian). APPPC

kemudian harus mengadakan pertemuan berkala dengan Direktur Jenderal FAO (Pasal II Ayat 3).²

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal VII Perjanjian. Dikatakan bahwa bila timbul suatu sengketa menyangkut interpretasi atau implementasi Perjanjian, atau menyangkut segala tindakan yang dilakukan oleh negara peserta berdasarkan Perjanjian ini, dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh APPPC, pemerintah atau pemerintah negara yang bersangkutan dapat meminta Direktur Jenderal FAO untuk membentuk suatu komite ahli untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Peraturan Terkait (*Related Regulations*)

Perjanjian ini terkait dengan *International Plant Protection Convention* 1951. (Sindy Fathan, SH)

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade*

Konsep (*Concept*)

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi) bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dan usaha kerja sama antar negara peserta Konvensi dalam perdagangan internasional dari bahan-bahan kimia berbahaya, dalam rangka melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari potensi kerusakan/bahaya. Konvensi ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam penggunaan bahan kimia berbahaya yang ramah lingkungan. Kontribusi ini dilakukan

² APPPC membentuk 3 Komite independen, yaitu *Standing Committee on plant quarantine*, *Standing Committee on integrated pest management*, *Standing Committee on pesticides*.

* <http://www.pic.int/en/ConventionText/ONU-GB.pdf>.

dengan memfasilitasi pertukaran informasi mengenai karakteristik bahan kimia berbahaya tersebut, menyediakan prosedur pengambilan keputusan mengenai proses impor dan ekspor bahan kimia berbahaya, serta menyebarluaskan keputusan tersebut kepada seluruh negara peserta Konvensi.

Konvensi menciptakan kewajiban hukum dalam implementasi prosedur *Prior Informed Consent* (PIC), yaitu suatu kewajiban bagi negara peserta untuk memperoleh dan menyebarluaskan keputusan dari negara pengimpor mengenai bersedia atau tidaknya mereka menerima pengiriman bahan-bahan kimia tertentu, dan memastikan kepatuhan terhadap keputusan-keputusan ini oleh negara pengekspor. Kewajiban tersebut menegaskan kembali prosedur PIC sukarela yang diterapkan oleh *United Nations on Environmental Program* (UNEP) dan FAO sejak 1989, dengan memperhitungkan pengalaman penggunaan prosedur PIC sukarela sebagaimana terdapat dalam *Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade (Amended London Guidelines)* dan *FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides (International Code of Conduct)*.

Latar Belakang (*Background*)

Konvensi ini dibentuk dengan mempertimbangkan ketentuan *Rio Declaration on Environment and Development*, Bab 19 Agenda 21 mengenai manajemen bahan kimia beracun terhadap lingkungan, termasuk pencegahan penyelundupan ilegal bahan kimia berbahaya dan beracun, beserta produknya. Konsep prosedur PIC pertama kali diinisiatifkan oleh kelompok kerja UNEP dan FAO dalam merumuskan *Amended London Guidelines* dan *International Code of Conduct*. Pada saat itu prosedur PIC masih merupakan ketentuan sukarela, bukan merupakan kewajiban negara peserta. Dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakat internasional mengenai bahaya yang mungkin timbul terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional, negara-negara menandatangani Konvensi ini pada 10 September 1998 di Rotterdam.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Konvensi, dikatakan bahwa Konvensi berlaku 90 hari setelah didepositkannya kelima puluh instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses. Konvensi ini berlaku sejak 24 Februari 2004, dan memiliki 116 Negara peserta.³

Prinsip Umum (*General Principles*)

Prinsip umum yang tercantum dalam Konvensi terdapat pada Pasal 1 mengenai tujuan Konvensi. Dikatakan bahwa Konvensi bertujuan untuk memeromosikan dan meningkatkan tanggung jawab bersama dan usaha-usaha kerjasama antar negara peserta, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional bahan-bahan kimia dan pestisida berbahaya, sehingga kesehatan manusia dan lingkungan dapat terlindungi.

Materi Pokok (*Main Features*)

Adapun materi pokok Konvensi, yang memiliki 30 Pasal dan 5 *Annex*, ini sebagai berikut:

1. Pasal 2 menjabarkan definisi umum dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam Konvensi ini.
2. Pasal 3 mengenai cakupan Konvensi, yaitu terbatas pada bahan-bahan kimia yang dilarang dan sangat terlarang; dan formulasi pestisida yang sangat berbahaya. Konvensi tidak dapat diterapkan pada bahan narkotika dan psikotropika, bahan-bahan radioaktif, limbah, senjata kimia, bahan-bahan farmasi (obat), bahan kimia untuk pengawet makanan, makanan, dan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
3. Pasal 4 mengatur bahwa setiap negara peserta harus menunjuk satu atau lebih pihak/otoritas yang berwenang di tingkat nasional untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif berdasarkan Konvensi ini. Setiap negara peserta harus memberitahukan nama dan alamat dari pihak/otoritas yang ditunjuk tersebut kepada Sekretariat (Ayat 3).

³Jumlah peserta per 1 April 2007. Lihat lampiran 1.

4. Pasal 5 mengatur tentang prosedur untuk menolak atau melarang masuknya bahan-bahan kimia. Pada Ayat 1 dikatakan bahwa setiap negara peserta yang telah mengadopsi langkah peraturan akhir, harus memberitahukan Sekretariat secara tertulis. Pemberitahuan tertulis ini dibuat sesegera mungkin, dan 90 hari setelah tanggal diadopsinya langkah peraturan akhir tersebut, langsung memiliki keberlakuan. Pemberitahuan tersebut juga memuat informasi yang ditentukan pada *Annex 1*. Pada Ayat 2 dikatakan bahwa setiap negara peserta pada tanggal berlakunya Konvensi, harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretariat mengenai langkah peraturan akhir yang berlaku pada saat itu, kecuali setiap negara peserta telah memberikan pemberitahuan mengenai langkah peraturan terakhir berdasarkan *Amended London Guidelines* dan *International Code of Conduct*. Kemudian Sekretariat segera menyebarluaskan ringkasan informasi yang diterima setiap 6 bulan, kepada negara-negara peserta lain (Ayat 4). Ketika Sekretariat menerima setidaknya satu pemberitahuan dari kedua wilayah PIC berdasarkan bahan kimia tertentu yang telah ditentukan dalam *Annex I*, informasi tersebut harus segera diteruskan kepada the *Chemical Review Committee* (Komite), untuk dikaji dan diberikan rekomendasi kepada Konferensi negara peserta mengenai apakah bahan kimia yang bersangkutan merupakan subyek prosedur PIC atau tidak (Ayat 5 dan 6). Komposisi wilayah PIC ditentukan berdasarkan keputusan melalui konsensus/kesepakatan pada pertemuan pertama Konferensi negara peserta (*Conference of Parties*).
5. Prosedur mengenai formulasi pestisida yang berbahaya ditentukan pada Pasal 6. Pasal ini menyebutkan bahwa negara peserta yang merupakan negara berkembang dapat mengajukan daftar formulasi pestisida yang berbahaya kepada Sekretariat, sesuai dengan ketentuan dalam *Annex III*. Dalam mengembangkan hal ini, negara peserta dapat mempergunakan tenaga ahli dari berbagai sumber yang relevan. Proposal yang diajukan harus memuat informasi

yang ditentukan pada bagian 1 *Annex IV*. Sekretariat kemudian sesegera mungkin, selambatnya 6 bulan setelah menerima proposal tersebut, memeriksa kelengkapan informasi yang termuat dalam proposal. Bila telah lengkap, maka Sekretariat harus meneruskan ringkasan informasi kepada seluruh negara peserta Konvensi. Apabila informasi yang dicantumkan dalam proposal belum lengkap, maka Sekretariat segera memberitahukan negara yang mengajukannya untuk dilengkapi (Ayat 2). Sekretariat meneruskan proposal kepada Komite untuk dimintakan rekomendasi mengenai perlu atau tidaknya formulasi pestisida tersebut menjadi subyek prosedur PIC, dan perlu atau tidaknya dimasukkan kedalam *Annex III* (Ayat 5).

6. Pasal 7 mengatur tentang daftar bahan-bahan kimia pada *Annex III*. Pada Ayat 1 dikatakan bahwa setiap bahan kimia yang diputuskan Komite untuk dimasukkan kedalam *Annex III*, harus disiapkan rancangan dokumen pedoman keputusan. Dokumen ini setidaknya memasukkan informasi yang diatur dalam *Annex I*. rekomendasi dan rancangan dokumen kemudian disampaikan pada Konferensi negara peserta untuk diadopsi. Apabila tercapai kesepakatan mengenai keputusan daftar yang terdapat pada *Annex III*, dan dokumen pedoman telah disepakati, Sekretariat segera mengumumkan kepada seluruh negara peserta.
7. Pasal 8 menyatakan bahwa untuk bahan kimia apapun, selain bahan kimia yang terdapat pada *Annex III*, yang merupakan subyek prosedur PIC sukarela sebelum tanggal pertemuan pertama Konferensi negara peserta, maka Konferensi memutuskan untuk memasukkan bahan-bahan kimia tersebut kedalam daftar di *Annex III*, dengan ketentuan bahwa semua persyaratan untuk pendataan kedalam *Annex* telah terpenuhi.
8. Ketentuan mengenai pencoretan bahan kimia dari daftar *Annex III*. Ketika suatu negara peserta menyerahkan informasi kepada Sekretariat bahwa tidak terdapat keputusan pada saat itu untuk mendaftarkan bahan kimia kedalam *Annex III*, dan bahwa informasi mengindikasikan bahwa

pendaftaran tersebut tidak lagi benar menurut kriteria yang relevan berdasar *Annex II* atau *Annex IV*, Sekretariat harus menyampaikan hal ini kepada Komite (Pasal 9 Ayat 1). Komite kemudian mengkaji kembali informasi yang diterimanya. Berdasarkan kriteria yang tercantum pada *Annex II* atau *Annex IV*, Komite merekomendasikan dicoretnya bahan kimia bersangkutan dari daftar *Annex III* (Ayat 2). Komite harus menyiapkan rancangan dokumen pedoman keputusan yang telah direvisi. Rekomendasi sebagaimana dikatakan pada Ayat 2 disampaikan dalam Konferensi negara peserta, dilampirkan pula rancangan dokumen pedoman keputusan yang telah direvisi. Konferensi negara peserta-lah yang memutuskan dicoret atau tidaknya bahan kimia tersebut dari daftar *Annex III*. Apabila telah disepakati, maka keputusan tersebut harus disebarluaskan kepada seluruh negara peserta Konvensi (Ayat 4).

9. Pasal 10 mengenai kewajiban negara peserta dalam rangka kegiatan impor bahan kimia berbahaya yang tercantum dalam *Annex III*. Ayat 1 Pasal ini mewajibkan setiap negara peserta untuk mengimplementasikan langkah-langkah legislatif dan administratif yang dipandang perlu untuk memastikan keputusan yang berkaitan dengan impor bahan kimia berbahaya yang tercantum dalam *Annex III*. Setiap negara peserta harus menyampaikan kepada Sekretariat, sesegera mungkin, selambatnya 9 bulan setelah tanggal disepakatinya dokumen pedoman putusan, mengenai jawaban berkaitan dengan rencana impor bahan kimia berbahaya tertentu. Bila dalam jawaban tersebut terdapat perubahan dari negara peserta, maka perubahan tersebut harus segera disampaikan kepada Sekretariat. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya, negara peserta tidak memberikan jawaban, maka Sekretariat harus memintakan jawaban kepada negara peserta yang bersangkutan (Pasal 10 Ayat 2 dan 3). Jawaban yang diberikan dapat berupa keputusan akhir, maupun keputusan sementara. Jawaban keputusan akhir harus memuat

penjelasan langkah legislatif dan administratif yang menjadi dasar pengambilan keputusan (Ayat 5 dan 6).

10. Ketentuan mengenai kewajiban negara peserta dalam rangka kegiatan ekspor bahan kimia berbahaya yang tercantum dalam *Annex III* diatur dalam Pasal 11. Ayat 1 mewajibkan setiap negara peserta pengeksport untuk:
 - mengimplementasikan langkah legislatif dan administratif dalam mengkomunikasikan jawaban yang disampaikan kepada Sekretariat;
 - mengambil langkah legislatif dan administratif yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pengeksport yang berada di wilayah negara peserta pengeksport mematuhi keputusan-keputusan yang tercapat dalam setiap jawaban, selambatnya 6 bulan setelah Sekretariat memberitahukan jawaban negara peserta pengeksport dan pengimpor untuk pertama kali kepada seluruh negara peserta Konvensi.
 - memberikan rekomendasi dan membantu negara peserta pengimpor, berdasarkan permintaan dan apabila memang diperlukan untuk mendapatkan informasi tambahan, serta untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan negara peserta pengimpor tersebut dalam mengatur keselamatan bahan kimia tersebut selama siklus hidup mereka.
 - memastikan bahwa bahan kimia yang tercantum dalam *Annex III* tidak dieksport dari wilayah negara peserta kepada negara peserta pengimpor yang tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban sementara yang didalamnya tidak terdapat keputusan sementara.
11. Pemberitahuan ekspor ditentukan pada Pasal 12. Pada Ayat 1 disebutkan bahwa suatu bahan kimia yang ditolak atau dilarang oleh suatu negara peserta, dieksport dari wilayah negara peserta tersebut, maka kepadanya harus disediakan suatu pemberitahuan ekspor kepada negara peserta pengimpor. Isi dari pemberitahuan tersebut adalah informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam *Annex V*, dan harus

diberitahukan sebelum pengeporan pertama dilakukan. Negara peserta pengeksport harus menghentikan kegiatan pengeksportannya ketika diketahui bahwa bahan kimia tersebut ternyata termasuk dalam daftar *Annex III*, atau negara peserta pengimpor memberikan jawaban sebagaimana dikatakan pada Pasal 10 Ayat 2, atau Sekretariat telah menyebarluaskan jawaban kepada negara-negara peserta sesuai dengan Pasal 10 Ayat 10.

12. Ketentuan mengenai informasi pendukung kegiatan ekspor bahan kimia diatur dalam Pasal 13. Pasal ini menjelaskan bahwa Konferensi negara peserta harus mendukung Organisasi Pajak Dunia (*World Customs Organization*) untuk turut pada beberapa ketentuan pajak tertentu yang terdapat dalam suatu sistem yang terharmonisasi (*Harmonized System Customs Codes*) kepada kelompok bahan kimia yang tercantum pada *Annex III*. Setiap negara mensyaratkan hal tersebut, dimana terdapat ketentuan yang telah terdaftar pada suatu bahan kimia, maka dokumen pengiriman bahan-bahan kimia tersebut menanggung pajak ekspornya.
13. Mekanisme pertukaran informasi antara negara peserta diatur pada Pasal 14. Ayat 1 menentukan bahwa setiap negara peserta harus memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah, teknis, ekonomi, dan hukum berkaitan dengan bahan kimia yang termasuk cakupan Konvensi; memfasilitasi ketersediaan informasi kepada umum mengenai tindakan-tindakan peraturan domestik berkaitan dengan tujuan Konvensi; memfasilitasi ketersediaan informasi bagi negara peserta lain, baik secara langsung, maupun melalui Sekretariat, mengenai tindakan-tindakan peraturan domestik yang pada intinya melarang penggunaan satu atau lebih bahan kimia. Dalam pelaksanaan pertukaran informasi ini diperbolehkan untuk melindungi dan merahasiakan informasi tertentu sebagaimana disepakati diantara negara-negara peserta (Ayat 2), kecuali informasi mengenai ketentuan *Annex I* dan *IV*, keselamatan data, tanggal kadaluwarsa bahan kimia, tindakan pencegahan kecelakaan

termasuk klasifikasi tingkat bahaya bahan kimia, dan ringkasan hasil kadar racun dan dampak racun tersebut terhadap lingkungan/ekologi (Ayat 3).

14. Pasal 15 mengatur tentang implementasi Konvensi, bahwa setiap negara peserta wajib mengambil segala langkah dan tindakan yang diperlukan untuk membentuk dan memperkuat infrastruktur dan institusi nasionalnya untuk tujuan implementasi ketentuan Konvensi secara efektif. Langkah dan tindakan ini meliputi pengadopsian atau perubahan ketentuan legislatif dan administratif nasional yang juga termasuk didalamnya mengenai pembentukan badan pendaftaran dan penyimpanan data (*database*) nasional mengenai bahan kimia, penggunaannya, dan petunjuk keselamatannya; dukungan inisiatif oleh industri dalam meningkatkan keselamatan penggunaan bahan kimia; dan promosi penggunaan kesepakatan sukarela terutama dalam hal perbantuan teknis pada Pasal 16. Bantuan teknis (*technical assistance*) merupakan kerjasama yang wajib dikembangkan antar negara peserta terutama antara negara maju dengan negara berkembang dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengatur bahan kimia agar tepat guna sebagaimana ditentukan dalam Konvensi.
15. Konferensi negara peserta merupakan suatu konferensi yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini. Pertemuan pertama dari Konferensi negara peserta dilakukan oleh Direktur Eksekutif UNEP dan Direktur Jenderal FAO, pada setidaknya 1 tahun setelah Konvensi ini berlaku. Setelahnya, pertemuan berkala dilakukan dengan jadwal yang ditentukan pada setiap pertemuan sebelumnya. Pertemuan luar biasa dilakukan apabila dipandang perlu oleh Konferensi negara peserta, atau apabila terdapat permintaan tertulis dari salah satu negara peserta dengan dukungan setidaknya satu pihak (negara peserta) ketiga. Adapun fungsi dari Konferensi negara peserta ini adalah:
 - Menetapkan badan-badan subsider, apabila memang diperlukan dalam pengimplementasian Konvensi;

- Bekerja sama dengan organisasi internasional, badan-badan antar pemerintah dan non-pemerintah relevan lain;
- Mempertimbangkan dan mengabil tindakan-tindakan yang memang diperlukan dalam mencapai tujuan Konvensi.

Dalam pertemuan-pertemuan Konferensi negara peserta, PBB dan badan-badan khusus lainnya seperti IAEA dapat hadir sebagai pengamat. (Pasal 18)

16. Pembentukan Sekretariat didasarkan pada Pasal 19. Sekretariat memiliki fungsi sebagai berikut:

- Membuat pengaturan untuk pertemuan Konferensi negara peserta, beserta badan-badan subsidernya;
- Memberikan bantuan kepada negara peserta, khususnya negara berkembang dalam rangka implementasi Konvensi;
- Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan sekretariat dari badan-badan internasional lain yang relevan;
- Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ditentukan dalam Konvensi.

Fungsi Sekretariat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Direktur Eksekutif UNEP dan Direktur Jenderal FAO, dengan ketentuan susunan tersebut disetujui oleh keduanya dan Konferensi negara peserta (Pasal 19).

Mekanisme Khusus (*Special Mechanisms*)

Konvensi ini dilengkapi dengan 5 buah *Annex* yang merupakan ketentuan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap negara peserta, adapun isinya sebagai berikut:

1. *Annex I*

Berisikan informasi yang dibutuhkan untuk pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 5. Pemberitahuan ini memuat data mengenai identifikasi properti dan pelaku perdagangan, identifikasi bahan kimia dan tujuan penggunaannya, langkah dan tindakan keputusan akhir.

2. *Annex II*

Berisikan tata cara dan kriteria untuk mengajukan bahan kimia kedalam daftar *Annex III*. Cara yang perlu diperhatikan suatu Komite adalah mengkaji kembali pemberitahuan yang diberikan oleh Sekretariat (sebagaimana pada Pasal 5 Ayat 5), kemudian memastikan tindakan dan langkah keputusan akhir telah diambil, menetapkan bahwa langkah tersebut diambil sebagai konsekuensi dari evaluasi resiko, dan mempertimbangkan apakah langkah tersebut menyediakan dasar pertimbangan kuat, terutama dalam mengkategorikan suatu bahan kimia termasuk kedalam daftar *Annex III*.

3. *Annex III*

Berisikan beberapa bahan kimia dan formulasi pestisida yang dilarang, sehingga merupakan subyek dibutuhkannya prosedur PIC dalam perdagangannya. Bahan kimia ini berjumlah 28 buah, antara lain: *Aldrin, Heptachlor, DDT, Parathion, Crocidolite, dan Tris Phosphate*.

4. *Annex IV*

Berisikan informasi, tata cara dan kriteria untuk mengajukan pestisida kedalam daftar *Annex III*. Proposal yang diajukan sekurangnya memuat identifikasi formulasi pestisida, jumlah pestisida, tujuan penggunaan, dan peraturan dan langkah legislatif dan administratif yang telah atau akan diambil berkaitan dengan proposal negara peserta yang bersangkutan.

5. *Annex V*

Berisikan informasi yang dipersyaratkan untuk pemberitahuan ekspor. Suatu notifikasi ekspor setidaknya memuat identitas otoritas negara peserta pengekspor dan pengimpor, tanggal pengiriman dan penerimaan bahan kimia, identifikasi bahan kimia yang diperdagangkan, pernyataan bahwa bahan kimia yang bersangkutan telah diketahui kategori dan penggunaannya, informasi mengenai langkah pencegahan dan kewaspadaan dalam mengurangi emisi bahan kimia, beserta informasi relevan lainnya.

Otoritas dan Pengawasan (*Authority and Monitoring*)

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 5, Konferensi negara peserta merupakan badan tertinggi yang dibentuk berdasarkan Konvensi, dan memiliki fungsi-fungsi penting terutama dalam pengambilan keputusan. Pengawasan Konferensi negara peserta.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa antar negara peserta berkaitan dengan interpretasi Konvensi, maka penyelesaian dilakukan melalui cara negosiasi (Ayat 1). Apabila negosiasi tidak berhasil, maka para pihak yang bersengketa dapat mempergunakan pilihan penyelesaian sengketa yang dinyatakan dalam dokumennya (Ayat 2):

- arbitrase berdasarkan prosedur yang disetujui Konferensi negara peserta pada sidang pertamanya, atau
 - menyerahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional
- Jika kedua prosedur tersebut tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan dengan konsiliasi (Ayat 6).

Peraturan Terkait (*Related Regulations*)

Konvensi ini terkait pada *Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade* dan *FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides*, yang merupakan awal mulanya diterapkan prosedur PIC dalam ketentuan internasional. (Sindy Fathan, SH)

Lampiran 1

Negara peserta	Penandatanganan	Ratifikasi, Penerimaan (A), Persetujuan (AA), Akses (a)
Angola	11 Sep 1998	
Argentina	11 Sep 1998	
Armenia	11 Sep 1998	11 Jun 2004
Australia	6 Jul 1999	26 Nov 2003
Austria	11 Sep 1998	20 May 2004
Barbados	11 Sep 1998	27 Aug 2002
Belgium	11 Sep 1998	
Belize		23 Oct 2002
		20 Apr 2005 a

Negara peserta	Penandatanganan	Ratifikasi, Penerimaan (A), Persetujuan (AA), Aksesi (a)
Benin	11 Sep 1998	5 Jan 2004
Bolivia		18 Dec 2003 a
Brazil	11 Sep 1998	16 Jun 2004
Bosnia and Herzegovina		19 Mar 2007 a
Bulgaria		25 Jul 2000 a
Burkina Faso	11 Sep 1998	11 Nov 2002
Burundi		23 Sep 2004 a
Cameroon	11 Sep 1998	20 May 2002
Canada		26 Aug 2002 a
Cape Verde		01 Mar 2006 a
Chad	11 Sep 1998	10 Mar 2004
Chile	11 Sep 1998	20 Jan 2005
China	24 Aug 1999	22 Mar 2005
Colombia	11 Sep 1998	
Congo	11 Sep 1998	13 Jul 2006
Cook Islands		29 Jun 2004 a
Costa Rica	17 Aug 1999	
Côte d'Ivoire	11 Sep 1998	20 Jan 2004
Cuba	11 Sep 1998	
Cyprus	11 Sep 1998	17 Dec 2004
Czech Republic	22 Jun 1999	12 Jun 2000
Democratic People's Republic of Korea		6 Feb 2004 a
Democratic Republic of the Congo	11 Sep 1998	23 Mar 2005
Denmark	11 Sep 1998	15 Jan 2004
Djibouti		10 Nov 2004 a
Dominica		30 Dec 2005 a
Dominican Republic		24 Mar 2006 a
Ecuador	11 Sep 1998	4 May 2004
El Salvador	16 Feb 1999	8 Sep 1999
Equatorial Guinea		7 Feb 2003 a
Eritrea		10 Mar 2005 a
Estonia		13 Jun 2006 (a)
Ethiopia		9 Jan 2003 a
European Community	11 Sep 1998	20 Dec 2002 AA
Finland	11 Sep 1998	4 Jun 2004 A

Negara peserta	Penandatanganan	Ratifikasi, Penerimaan (A), Persetujuan (AA), Akses (a)
France	11 Sep 1998	17 Feb 2004 AA
Gabon		18 Dec 2003 a
Gambia		26 Feb 2002 a
Germany	11 Sep 1998	11 Jan 2001
Georgia		27 Feb 2007 a
Ghana	11 Sep 1998	30 May 2003
Greece	11 Sep 1998	23 Dec 2003
Guinea		7 Sep 2000 a
Guinea-Bissau	10 Sep 1999	
Hungary	10 Sep 1999	31 Oct 2000
India		24 May 2005 a
Indonesia	11 Sep 1998	
Iran (Islamic Republic of)	17 Feb 1999	26 Aug 2004
Ireland		10 Jun 2005 a
Israel	20 May 1999	
Italy	11 Sep 1998	27 Aug 2002
Jamaica		20 Aug 2002 a
Japan	31 Aug 1999	15 Jun 2004 A
Jordan		22 Jul 2002 a
Kenya	11 Sep 1998	3 Feb 2005
Kuwait	11 Sep 1998	12 May 2006
Kyrgyzstan	11 Aug 1999	25 May 2000
Latvia		23 Apr 2003 a
Liberia		22 Sep 2004 a
Lebanon		13 Nov 2006
Libyan Arab Jamahiriya		9 Jul 2002 a
Liechtenstein		18 Jun 2004 a
Lithuania		17 Mar 2004 a
Luxembourg	11 Sep 1998	28 Aug 2002
Madagascar	8 Dec 1998	22 Sep 2004
Malaysia		4 Sep 2002 a
Maldives		17 October 2006 a
Mali	11 Sep 1998	5 Jun 2003
Marshall Islands		27 Jan 2003 a
Mauritania	1 Sep 1999	22 Jul 2005 A
Mauritius		5 August 2005 a
Mexico		4 May 2005 a

Negara peserta	Penandatanganan	Ratifikasi, Penerimaan (A), Persetujuan (AA), Aksesi (a)
Mongolia	11 Sep 1998	8 Mar 2001
Namibia	11 Sep 1998	24 Jun 2005
Nepal		9 Feb 2007 a
Netherlands	11 Sep 1998	20 Apr 2000 A
New Zealand	11 Sep 1998	23 Sep 2003
Niger		16 Feb 2006 a
Nigeria		28 Jun 2001 a
Norway	11 Sep 1998	25 Oct 2001 A
Oman		31 Jan 2000 a
Pakistan	9 Sep 1999	14 Jul 2005
Panama	11 Sep 1998	18 Aug 2000
Paraguay	11 Sep 1998	18 Aug 2003
Peru	11 Sep 1998	14 Sept 2005
Philippines	11 Sep 1998	31 Jul 2006
Poland		14 Sept 2005 a
Portugal	11 Sep 1998	16 Feb 2005 AA
Qatar		10 Dec 2004 a
Republic of Korea	7 Sep 1999	11 Aug 2003
Republic of Moldova		27 Jan 2005 a
Romania		2 Sep 2003 a
Rwanda		7 Jan 2004 a
Saint Lucia	25 Jan 1999	
Samoa		30 May 2002 a
Saudi Arabia		7 Sep 2000 a
Senegal	11 Sep 1998	20 Jul 2001
Seychelles	11 Sep 1998	
Singapore		24 May 2005 a
Slovakia		26 Jan 2007 a
Slovenia	11 Sep 1998	17 Nov 1999
South Africa		4 Sep 2002 a
Spain	11 Sep 1998	2 Mar 2004
Sri Lanka		19 Jan 2006 a
Sudan		17 Feb 2005 a
Suriname		30 May 2000 a
Sweden	11 Sep 1998	10 Oct 2003
Switzerland	11 Sep 1998	10 Jan 2002
Syrian Arab Republic	11 Sep 1998	24 Sep 2003

Negara peserta	Penandatanganan	Ratifikasi, Penerimaan (A), Persetujuan (AA), Aksesi (a)
Tajikistan	28 Sep 1998	
Thailand		19 Feb 2002 a
Togo	9 Sep 1999	23 Jun 2004
Tunisia	11 Sep 1998	
Turkey	11 Sep 1998	
Ukraine		6 Dec 2002 a
United Arab Emirates		10 Sep 2002 a
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	11 Sep 1998	17 Jun 2004
United Republic of Tanzania	11 Sep 1998	26 Aug 2002
United States of America	11 Sep 1998	
Uruguay	11 Sep 1998	4 Mar 2003
Venezuela (Bolivarian Republic of)		19 Apr 2005 a
Yemen		4 Feb 2006 a

The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*

Konsep (Concept)

The International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture (Konvensi) ini mengakui bahwa petani dan komunitasnya telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melakukan konservasi dan pengembangan dari sumber daya genetika tanaman. Hal ini merupakan hak dasar bagi para petani, yang termasuk didalamnya perlindungan dari pengetahuan tradisional dan hak untuk berpartisipasi dalam pembagian keuntungan (*benefit-sharing*) dan pengambilan keputusan nasional (*national decision-making*) mengenai sumber daya genetika tanaman. Hal ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dari negara peserta untuk melaksanakan hak ini.

* <http://www.fao.org/AG/cgrfa/itpgr.htm>

Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian, yang merupakan unsur yang vital bagi ketahanan hidup manusia, dilindungi dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain itu Konvensi memastikan bahwa keuntungan dari penggunaan sumber daya genetika tanaman ini terbagi dan terpasrkan dalam jumlah yang adil. Keuntungan ini tidak hanya diperoleh oleh peneliti dan ilmuwan, namun ditujukan lebih kepada petani dan pembudidaya tanaman, baik dari sektor publik maupun swasta.

Pada dasarnya Konvensi memberikan kerangka hukum internasional yang menjadi suatu kunci utama dalam memastikan ketahanan pangan pada saat ini dan di masa mendatang. Tantangan utama dari Konvensi adalah untuk memastikan bahwa Konvensi ini dapat berjalan dengan baik. Konvensi ini untuk pertama kalinya memuat sistem multilateral dibidang akses fasilitas, pembagian keuntungan tanaman pangan dan ketahanan pangan. Sistem multilaterla ini berfungsi pula dalam memastikan distribusi yang adil terhadap keuntungan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya genetika tanaman, terutama pada petani pada khususnya di negara-negara berkembang.

Latar Belakang (*Background*)

Sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian merupakan hal yang penting dalam kehidupan seluruh populasi di dunia. Sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian tersebut sering digunakan oleh petani dan pembudidaya tanaman (*plant breeders*) dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil panen. Masa depan pertanian tergantung pada kerjasama internasional mengingat tidak ada satu negara pun yang dapat mencukupi dirinya sendiri. Satu negara dengan negara lain dapat saling melakukan tukar-menukar hasil panen dan varietas genetika (*genetic diversity*) negara mereka.

Setelah tujuh tahun melakukan negosiasi, Konferensi *Food and Agriculture Organization* (FAO) melalui Resolusi 3/2001 mengadopsi *the International Treaty on Plant Genetic Resources for Foor and Agriculture* (selanjutnya disebut Konvensi) pada November 2001. Perjanjian internasional yang bersifat mengikat ini

mencakup peraturan mengenai seluruh sumber daya genetika tanaman yang berhubungan dengan makanan dan pertanian. Perjanjian internasional ini juga selaras dengan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi CBD).

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Konvensi ini terbuka untuk tandatangan pada FAO sejak 3 November 2001 sampai 4 November 2002 oleh seluruh anggota FAO dan negara-negara lain yang tidak tergabung dalam FAO namun merupakan negara anggota PBB atau badan-badan khusus atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA).

Berdasarkan Pasal 28, Konvensi mulai berlaku 90 hari setelah dilakukannya penyimpanan instrumen ratifikasi, akses, penerimaan, atau persetujuan oleh sekurang-kurangnya 20 negara anggota FAO. Apabila instrumen tersebut diberikan oleh negara-negara non anggota FAO, namun merupakan negara anggota PBB, maka setidaknya-tidaknya terdapat 40 negara yang memberikan instrumen tersebut, dan baru dapat berlaku pada hari kesembilan puluh setelah disimpannya instrumen tersebut. Konvensi ini telah berlaku sejak 29 Juni 2004. Negara yang telah meratifikasi Konvensi ini akan menjadi *Governing Body* dari Konvensi.

Prinsip-prinsip Umum (*General Principles*)

Secara keseluruhan, Konvensi ini menganut *Precautionary Principle*, dimana para negara peserta harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan serta pelestarian dari sumber-sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian. Pada Pasal 4 dikatakan bahwa setiap negara peserta harus menjamin kesesuaian Konvensi ini dengan hukum nasionalnya, peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur dengan kewajibannya yang terdapat dalam Konvensi ini.

Prinsip umum lain yang terdapat dalam Konvensi ini adalah prinsip penggunaan berkelanjutan (*sustainable use*) prinsip mengenai kerjasama internasional, sebagaimana terdapat pada Pasal 7.

Materi-materi Pokok (*Main Features*)

Konvensi ini terdiri dari 35 pasal dan 2 Annex. Keseluruhan pasal dalam Konvensi mengatur mengenai :

1. Tujuan Konvensi

Tujuan dari dibentuknya Konvensi ini adalah untuk pelestarian dan pemakaian yang berkelanjutan akan sumber daya genetika tanaman yang dimanfaatkan untuk pangan dan pertanian yang adil dan selaras dengan Konvensi keanekaragaman hayati. Tujuan ini juga berkaitan dengan *FAO Treaty* dan Konvensi CBD (Pasal 1).

2. Pemakaian Istilah

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Konvensi ini. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dalam Pasal 2, diantaranya :

"In Situ Conservation", artinya perlindungan atas ekosistem dan habitat-habitat alam dan perawatan dan perbaikan atas populasi dari spesies yang ada di lingkungan sekitarnya.

"Ex Situ Conservation", artinya perlindungan atas sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian diluar habitat alam

"Plant genetic resources for food and agriculture", artinya materi-materi genetika atau tanaman asli atau yang tanaman yang dapat bermanfaat bagi pangan dan pertanian.

Pasal 3 mengatur mengenai cakupan Konvensi yang meliputi sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian.

3. Setiap negara peserta, berdasarkan peraturan nasionalnya, berkewajiban, bekerja sama dengan negara peserta lain apabila diperlukan, mempromosikan pendekatan integrasi terhadap perlindungan dan pemakaian sumber daya genetika tanaman yang berkelanjutan untuk pangan dan pertanian (Pasal 5), antara lain melalui:

a. Survey dan menginventaris sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian, termasuk status dan derajat variasi dalam populasinya dan yang memiliki potensi pemakaian dan ancaman-ancaman yang ada terhadap mereka.

b. Mempromosikan kumpulan sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian dan informasi terhadap sumber

daya genetika tanaman baik yang terancam maupun yang dapat digunakan.

- c. Mempromosikan atau mendukung para petani dan masyarakat lokal untuk berusaha mengelola dan melindungi sumber daya genetika tanaman yang digunakan bagi pangan dan pertanian
- d. Mempromosikan *in situ conservation* atas *wild crop relatives* dan tanaman liar bagi produksi pangan termasuk didalam area yang dilindungi dengan mendukung usaha-usaha yang dilakukan masyarakat asli dan masyarakat lokal.
- e. Bekerja sama dalam mempromosikan perkembangan yang efisien dan berkelanjutan atas *ex situ conservation*, memberikan batas perhatian yang diperlukan untuk dokumentasi, *characterization*, regenerasi dan evaluasi serta mempromosikan perkembangan dan transfer teknologi yang memadai bagi tercapainya tujuan peningkatan pemakaian sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian yang berkelanjutan.
- f. Memantau perawatan, derajat variasi dan juga integritas genetika atas kumpulan sumber-sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian

Selain itu, negara-negara peserta juga harus mengambil langkah-langkah untuk meminimaliasi atau menghilangkan ancaman terhadap sumber-sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian (Pasal 5 ayat 2).

4. Pasal 6 mengatur tentang pemakaian sumber-sumber daya genetika tanaman secara berkelanjutan. Dimana negara-negara peserta harus mengembangkan kebijakan-kebijakan nasional serta tindakan-tindakan hukum yang dapat mempromosikan pemakaian sumber daya genetika tanaman yang berkelanjutan bagi pangan dan pertanian (Pasal 6 ayat 1). Pada ayat 2 dikatakan bahwa tindakan ini meliputi:
 - a. Mengadakan kebijakan-kebijakan pertanian yang adil untuk pengembangan dan perawatan perbedaan sistem pertanian.
 - b. Meningkatkan penelitian yang dapat meningkatkan dan melestarikan penganeekaragaman hayati dengan memaksi-

- malkan intra dan inter-spesifik variasi untuk kepentingan para petani.
- c. Memeromosisikan usaha dalam menyuburkan tanaman dengan partisipasi para petani terutama di negara-negara berkembang, Memperluas daerah pengembangan genetika dan meningkatkan luas dari penganeekaragaman genetika bagi para petani. Mempromosikan penggunaan pemakaian atas bibit lokal, varieties dan spesies.
 - d. Mendukung pemakaian penganeekaragaman varieties dan spesies dalam pengelolaan dalam pertanian (*on-farm*), perlindungan, dan pemakaian berkelanjutan atas pembibitan dan memperkuat hubungan antara perkembangan pertanian dengan pembibitan tanaman, serta memeromosisikan peningkatan produksi pangan dunia yang sesuai dengan perkembangan.
 - e. Melakukan review dan menyesuaikan strategi pembibitan dan peraturan-peraturan yang menyangkut penggunaan varieties dan distribusi benih.
5. Setiap negara peserta diwajibkan untuk saling berintegrasi dengan perkembangan pertanian serta kebijakan-kebijakan dan program-program nasional, dan bekerja sama dengan negara peserta lainnya baik langsung atau melalui FAO dan organisasi internasional lain yang berkaitan dalam perlindungan dan pemakaian berkelanjutan atas sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian.

Kerjasama internasional harus secara langsung untuk (Pasal 7) :

- a. Membuat atau meningkatkan kemampuan dari negara-negara berkembang dan negara-negara yang dalam transisi-transisi ekonomi dalam melindungi dan pemakaian berkelanjutan atas sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian.
- b. Meningkatkan kerjasama internasional untuk memeromosisikan perlindungan, evaluasi, dokumentasi, peningkatan genetika, pembibitan tanaman, pengembangan benih dan pembagian, penyediaan akses, pertukaran, yang sesuai dengan Bagian VI, sumber-sumber daya genetika tanaman

- bagi pangan dan pertanian serta informasi dan teknologi yang memadai.
- c. Perawatan dan peningkatan perjanjian-perjanjian institusional yang dijelaskan dalam Pasal V; dan
 - d. Melakukan strategi pendanaan.

Pasal 8 menyebutkan mengenai bantuan teknis, antara lain dalam memeromosisikan ketentuan-ketentuan dalam bantuan-bantuan teknis kepada negara-negara peserta lainnya, terutama kepada negara-negara berkembang atau negara-negara dalam transisi ekonomi, baik secara bilateral maupun melalui organisasi internasional dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Konvensi ini.

Pasal 9 menyebutkan mengenai hak petani. Hak-hak ini meliputi diakuinya akan besarnya kontribusi masyarakat lokal dan para petani di seluruh dunia, terutama mereka yang berada di pusat pembibitan, telah membuat dan akan melanjutkan perkembangan serta perlindungan atas sumber daya genetika tanaman yang memuat dasar-dasar produksi pangan dan pertanian diseluruh dunia. Ayat 2 mengatakan bahwa negara peserta bersepakat untuk memenuhi hak-hak petani yang antara lain meliputi :

- a. Perlindungan atas pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian
- b. Hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembagian keuntungan yang muncul saat pemanfaatan dari sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan dalam tingkat nasional terhadap hal yang berhubungan dengan pelestarian dan pemakaian yang berkelanjutan atas sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian.

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh membatasi hak-hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual hasil-hasil pertaniannya, yang diatur dalam hukum nasional (Pasal 9 ayat 3). Pasal 10 – 13 Konvensi membahas mengenai

sistem multilateral dan pembagian keuntungan dari sistem tersebut.

6. Pasal 14 mengatur tentang *Global Plan of Action*, yang berperan memberikan perlindungan dan pemakaian sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian secara berkelanjutan. Dimana negara-negara peserta harus mempromosikan tindakan-tindakan efektif termasuk diantaranya melalui tindakan-tindakan nasional dan apabila dibutuhkan kerjasama internasional untuk menyediakan agenda yang berkesinambungan.
7. Pengaturan mengenai *Ex-Situ collection* atas sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian diatur pada Pasal 15. Negara-negara peserta mengakui pentingnya *Ex-Situ Collection* atas sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian yang dipercayai kepada *International Agricultural Research Centres (IARCs)* dari *Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)*.
8. Kerjasama yang timbul dalam jaringan internasional mengenai sumber-sumber daya genetika bagi pangan dan pertanian yang sejalan dengan Konvensi ini akan mendorong atau mengembangkan perjanjian-perjanjian yang ada sebagai jaringan atas sumber-sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian (Pasal 16 ayat 1).
9. Sistem Informasi Global atas sumber-sumber daya genetika tanaman untuk pangan dan pertanian diatur pada Pasal 17. Negara-negara peserta wajib untuk saling bekerja sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem informasi global untuk memfasilitasi pertukaran informasi, berdasarkan sistem informasi yang ada, mengenai hal-hal ilmiah, teknis, dan menyangkut lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya genetika tanaman.
10. Negara-negara peserta sepakat untuk melaksanakan strategi keuangan untuk pelaksanaan Konvensi, dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, transparansi, efisiensi dan efektivitas ketentuan-ketentuan dalam sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan aktifitas menurut Konvensi ini (Pasal 18 ayat 2). Strategi pendanaan ini diprioritaskan kepada negara

berkembang atau negara yang berada dalam transisi ekonomi, dan menjalankan *Global Plan of Action* (Pasal 18 ayat 3).

Strategi Pendanaan adalah sebagai berikut (Pasal 18 ayat 4):

- a. Negara-negara peserta wajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang menjamin pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang menjadi prioritas serta alokasi dana secara efektif.
- b. Negara-negara peserta yang masih dalam tahap berkembang dan dalam transisi ekonomi akan secara efektif melaksanakan komitmen Konvensi dan masih tergantung terhadap alokasi dana akan mendapat prioritas dalam melaksanakan rencana-rencana dan program-program mereka.
- c. Negara-negara peserta yang merupakan negara maju dapat menyediakan sumber-sumber keuangan bagi pelaksanaan Konvensi ini melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Setiap negara bersepakat untuk menyediakan sumber keuangan bagi aktivitas-aktivitas nasional untuk pelestarian dan penggunaan berkelanjutan atas sumber-sumber daya genetika tanaman bagi pangan dan pertanian sesuai dengan kemampuan nasional dan sumber keuangan.
- d. Kontribusi secara sukarela juga dapat diberikan oleh negara-negara peserta, sektor swasta, NGO dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan Pasal 13. Negara-negara peserta wajib mempertimbangkan strategi dalam mempromosikan kontribusi tersebut.

Pengawasan (*Authority*)

Konvensi membentuk *Governing Body* berdasarkan Pasal 19, sebagai badan yang terdiri dari seluruh negara peserta Konvensi. Seluruh keputusan-keputusan *Governing Body* harus diambil melalui konsensus negara-negara peserta. Fungsi dari *Governing Body* adalah untuk mempromosikan pelaksanaan Konvensi ini, terutama untuk :

- a. Menyediakan arah kebijakan, mengawasi, dan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi dalam pelaksanaan Konvensi, terutama dalam menjalankan Sistem Multilateral. Mengadopsi rencana dan program-program untuk pelaksanaan Konvensi.

- b. Mengadopsi, mengkaji ulang rencana keuangan dan strategi pendanaan secara berkala. Mempertimbangkan tugas, komposisi serta ketersediaan keuangan bagi badan-badan dibawahnya sesuai yang diperlukan.
- c. Mempertimbangkan dan membuat mekanisme yang diperlukan seperti Rekening Bersama (*Trust Account*) untuk menerima dan menggunakan sumber-sumber keuangan untuk pelaksanaan Konvensi ini.
- d. Membuat dan menjaga kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional terkait dan badan-badan dalam Konvensi, terutama konferensi negara-negara peserta Konvensi CBD, dalam hal yang tercakup dalam Konvensi ini termasuk partisipasi mereka didalam strategi pendanaan.
- e. Mempertimbangkan dan mengadopsi amandemen Konvensi beserta annex-annex yang ada dalam Konvensi ini sesuai dengan Pasal 24.
- f. Mempertimbangkan strategi-strategi untuk mendorong kontribusi secara sukarela terutama yang termasuk dalam pasal 13 dan 18.
- g. Menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang diperlukan untuk tercapainya tujuan Konvensi ini.
- h. Mencatat keputusan-keputusan dari konferensi negara-negara peserta CBD dan organisasi-organisasi internasional serta badan-badan lain yang terkait dengan pelaksanaan Konvensi ini.
- i. Menginformasikan kepada konferensi negara-negara peserta CBD dan organisasi-organisasi internasional serta badan-badan lain yang terkait menyangkut pelaksanaan Konvensi ini.
- j. Menyetujui perjanjian-perjanjian dengan IARCs dan institusi internasional lainnya berdasarkan pasal 15, dan mengkaji serta mengamandemen MTA dalam pasal 15 (Pasal 19 ayat 3).

Konvensi juga memilih *Secretary* dari *Governing Body* yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal FAO dengan persetujuan dari *Governing Body*. *Secretary* dapat dibantu oleh staff yang memenuhi syarat (Pasal 20).

Secretary harus menjalankan fungsi-fungsi dibawah ini :

- a. Mengatur dan menyediakan pendukung-pendukung administratif dalam setiap pertemuan dengan *Governing Body* dan untuk Badan-badan yang ada dibawahnya.
- b. Membantu *Governing Body* dalam menjalankan fungsinya termasuk menjalankan tugas-tugas khusus yang ditugaskan kepada *Governing Body*.
- c. Melaporkan aktifitas-aktifitas yang dilakukannya kepada *Governing Body* (Pasal 20 ayat 2).
- d. Bekerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya dan badan-badan yang ada dalam Konvensi ini terutama dengan pihak *Secretariat* dari Konvensi CBD dalam mencapai tujuan Konvensi (Pasal 20 ayat 5).

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Apabila terdapat sengketa antara negara-negara peserta menyangkut penafsiran atau penerapan perjanjian, negara tersebut harus mencari penyelesaian melalui negosiasi (Pasal 22 ayat 1). Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan melalui negosiasi, maka mereka dapat meminta mediasi melalui pihak ketiga (Pasal 22 ayat 2)

Saat ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau pelaksanaan Konvensi ini, atau setelahnya, negara-negara peserta dapat memberitahukan secara tertulis kepada *Depositary* bahwa perselisihan ini tidak akan diselesaikan melalui Pasal 22 ayat 1 atau Pasal 22 ayat 2 diatas, sehingga untuk menyelesaikan sengketa tersebut wajib dilakukan :

- a. Arbitrase berdasarkan prosedur yang terdapat dalam Part I Annex II dari perjanjian ini
- b. Pendaftaran penyelesaian sengketa melalui *International Court of Justice* (selanjutnya disingkat ICJ) (Pasal 22 ayat 3).

Pada saat para pihak tidak menerima penyelesaian berdasarkan Pasal 22 ayat 3 diatas, maka perselisihan tersebut dapat didaftarkan pada badan konsiliasi yang terdapat dalam Part 2 dari Annex II dalam perjanjian ini dengan kesepakatan para pihak (Pasal 22 ayat 4).

Mekanisme Khusus (*Special Mechanism*)

Konvensi ini tidak terlepas dari kedua Annexnya. Annex I berisikan daftar tanaman pangan yang masuk kedalam cakupan Sistem Multilateral Konvensi. Sedangkan Annex II mengatur tentang penyelesaian sengketa. Annex ini sendiri terbagi dalam dua bagian, yang pertama mengenai arbitrase, sedangkan yang kedua mengatur tentang konsiliasi. Berikut dipaparkan ketentuan Annex II.

Pihak penggugat harus memberitahukan kepada *Secretary* bahwa para pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase sesuai dengan Pasal 22. *Secretary* akan meneruskan informasi ini kepada seluruh negara-negara peserta perjanjian ini (Pasal 1). Apabila sengketa ini melibatkan dua pihak, maka tribunal Arbitrase harus terdiri dari 3 anggota. Kedua negara peserta pihak yang bersengketa masing-masing memilih seorang arbitrator, kemudian dari kedua arbitrator ini dipilih arbitrator ketiga sebagai Presiden Tribunal. Para arbitrator ini tidak boleh merupakan warga negara dari kedua negara yang bersengketa, tidak boleh memiliki tempat tinggal (*residence*) di kedua negara atau tidak memiliki pekerjaan di kedua negara tersebut, dan juga tidak memiliki kasus yang berhubungan dengan kedua negara tersebut (Pasal 2 ayat 1).

Dalam sengketa yang melibatkan lebih dari dua negara peserta maka para pihak yang bersengketa yang memiliki kepentingan yang sama dapat menunjuk satu orang Arbitrator secara bersama-sama dengan perjanjian (Pasal 2 ayat 2)

Tribunal Arbitrase harus membuat keputusannya sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan hukum internasional (Pasal 4). Tribunal Arbitrase dapat menentukan aturan-aturan prosedurnya tersendiri dengan persetujuan para pihak yang bersengketa (Pasal 5). Tribunal Arbitrase dapat merekomendasikan tindakan-tindakan perlindungan atas persetujuan pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 6). Biaya arbitrase dikenakan kepada kedua belah pihak dengan beban yang sama kecuali tribunal arbitrase menentukan lainnya (Pasal 9). Pada sistem Tribunal Arbitrase ini dimungkinkan dilakukan intervensi oleh negara-negara

peserta yang memiliki kepentingan hukum yang berkaitan dengan sengketa.

Tribunal harus menyampaikan putusan akhirnya dalam kurun waktu 5 bulan sejak tanggal perkara dimulai dan dapat diperpanjang dengan ketentuan tidak melebihi waktu 5 bulan (Pasal 14). Putusan akhir Arbitrase ini harus memuat pokok permasalahan, alasan pengambilan putusan, dan nama negara-negara anggota yang ikut berperan dan dissenting opinion di lembar terpisah (Pasal 15). Putusan Arbitrase ini mengikat kepada para pihak, dan dapat dilakukan banding dengan persetujuan pihak lainnya untuk sebelumnya. (Pasal 16).

Bagian kedua mengatur tentang Komisi Konsiliasi, yang dibentuk berdasarkan permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Atas persetujuan para pihak, Komisi Konsiliasi terdiri dari 5 anggota, dimana 2 anggota di tunjuk oleh para pihak yang bersengketa dan bersama-sama Presiden Komisi terpilih menunjuk 2 anggota lainnya (Pasal 1). Bila terdapat sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak, maka pihak yang bersengketa yang memiliki kepentingan yang sama dapat menunjuk kepada anggota Komisi Konsiliasi dengan persetujuan bersama. Jika pihak yang bersengketa memiliki kepentingan yang berbeda maka mereka dapat menunjuk anggota komisi konsiliasi lainnya secara terpisah (Pasal 2). Jika Presiden Komisi Konsiliasi belum terpilih dalam jangka waktu 2 bulan sejak terpilihnya anggota Komisi Konsiliasi yang terakhir, maka Direktur Jenderal FAO yang akan menunjuk Presiden Komisi Konsiliasi dalam waktu 2 bulan (Pasal 4).

Komisi Konsiliasi, dengan persetujuan para anggotanya, dapat mengambil putusannya dengan cara voting terbanyak, kecuali para anggotanya memilih prosedur lain dengan persetujuan para pihak yang bersengketa (Pasal 5). Persetujuan mengenai masalah kompetensi Komisi Konsiliasi ditentukan oleh Komisi Konsiliasi (Pasal 6).

Peraturan Terkait (*Related Regulations*)

Adapun peraturan lain yang terkait dengan Konvensi adalah:

1. *Rome Declaration on World Food Security*
2. *World Food Summit Plan of Action.*

(Fika Yulialdina Hakim, SH)

International Plant Protection Convention*

Konsep (Concept)

International Plant Protection Convention (Konvensi) merupakan konvensi yang dibentuk untuk menjalin kerjasama internasional dalam mengontrol kesehatan tanaman. Konvensi ini bertujuan untuk menjamin dilakukannya aksi bersama dan efektif oleh negara peserta dalam mencegah penyebaran penyakit dan hama yang dibawa oleh tanaman yang melewati batas-batas negara berikut langkah-langkah pengendaliannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, konvensi ini memberikan harmonisasi kerangka perlindungan, langkah-langkah teknis seperti langkah *phytosanitary* dan ketentuan yang berkaitan dengan impor, serta forum kerjasama antar negara. Konsep utama penerapan langkah-langkah *phytosanitary* yang diatur oleh Konvensi adalah:

- *Necessity*. Setiap pemberlakuan larangan dan pembatasan harus diterapkan atas dasar pertimbangan *phytosanitary*.
- *Technical justification*. Langkah-langkah *phytosanitary* yang ditempuh harus sesuai dan dibenarkan secara teknis.
- *Transparency*. Langkah-langkah *phytosanitary* berikut latar belakang penerapan langkah tersebut harus dipublikasikan dengan segera kepada seluruh negara anggota.
- *Minimal impact*. Langkah-langkah *phytosanitary* harus konsisten dengan resiko hama dan memiliki implikasi seminimal mungkin terhadap pergerakan barang dan komoditas, terutama tanaman dan produk tanaman.
- *Non-discrimination*. Langkah-langkah *phytosanitary* harus diterapkan tanpa diskriminasi di antara negara yang memiliki status *phytosanitary* yang sama.

Latar Belakang (Background)

Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi modern serta perkembangan perdagangan internasional semakin meningkatkan arus lalu-lintas modal, barang, dan jasa antar negara. Salah satu konsekuensinya adalah peningkatan arus perpindahan tanaman

* <http://www.ippc.int>

atau produk tanaman secara lintas batas sehingga diperlukan suatu pengaturan agar tidak menjadikannya sarana penyebaran penyakit dan hama. Kesadaran masyarakat internasional untuk menjaga kesehatan tanaman sudah dimulai sejak disepakatinya *Phylloxera Convention* di Berne tahun 1881 oleh dua belas negara untuk mengatur perdagangan *grapevines*.

Forum internasional pertama yang membahas perlindungan tanaman dengan sasaran yang lebih luas adalah *Conference for Plant Protection* di Roma 1929 yang menyusun rancangan Konvensi ini. Setelah terhenti akibat Perang Dunia-II, *Food Agricultural Organization* (FAO) kembali membahas rancangan Konvensi dalam konferensi FAO. Dalam sesi keenam pada tahun 1951, konferensi FAO mengadopsi Konvensi ini dan didepositkan oleh *Director General* FAO. Konvensi ini berlaku (*entered into force*) pada tahun 1952 setelah diratifikasi oleh tiga negara. Amandemen terhadap Konvensi diusulkan pada tahun 1973, terutama berkaitan dengan perubahan model dalam *phytosanitary certificates*. Amandemen ini diadopsi oleh FAO pada tahun 1979 dan berlaku pada tahun 1991 setelah diterima oleh dua pertiga negara peserta konvensi.

Pada tahun 1986, terjadi perubahan yang sangat besar ketika perundingan *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) memasuki putaran kedelapan yang dikenal dengan *Uruguay Round*. Sebelum putaran tersebut berakhir pada tahun 1993, anggota peserta konvensi ini dan FAO telah sepakat untuk menguatkan posisi Konvensi dalam kaitannya dengan *Agreement on The Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS Agreement). Dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi yang dihasilkan dari putaran Uruguay, Konvensi bertujuan untuk mendorong harmonisasi dan menciptakan standar internasional mengenai *phytosanitary measures*, serta mencegahnya digunakan sebagai hambatan terselubung (*disguised barrier*) dalam perdagangan internasional. Menanggapi hal demikian, FAO membentuk sekretariat Konvensi pada tahun 1992, diikuti dengan pembentukan *Committee of Experts on Phytosanitary Measures* (CEPM) di tahun 1993. Pada saat yang sama, anggota peserta Konvensi juga ingin melakukan amandemen terhadap Konvensi

untuk memperkuat hubungan antara Konvensi dengan SPS Agreement. Negosiasi amandemen berakhir pada tahun 1997 ketika Konferensi FAO menyetujui revisi teks Konvensi. Revisi ini (*New Revised Text of 1997*) memfokuskan pada kerjasama dan pertukaran informasi dalam rangka mencapai harmonisasi. Selain memperkuat tanggung jawab nasional dalam perlindungan kesehatan tanaman, revisi juga memperkenalkan penggunaan *International Standards for Phytosanitary Measures* (ISPMs). Selanjutnya yang dibahas dalam ulasan ini adalah Konvensi hasil revisi tahun 1997.

Keberlakuan (*Entry into Force*)

Berdasarkan *article 21 paragraph 4* yang mengatur mengenai amandemen, amandemen terhadap Konvensi membutuhkan persetujuan dari *Commission on Phytosanitary Measures* (CPM) dan berlaku 30 hari setelah penerimaan dari dua pertiga negara peserta. Dalam *Interim Commission on Phytosanitary Measures* (ICPM) sebagai lembaga sementara sebelum CPM dibentuk disepakati bahwa keberlakuan revisi dari Konvensi berlaku untuk seluruh negara peserta, termasuk bagi negara yang tidak melakukan penerimaan revisi Konvensi pada saat keberlakuan. Pada akhirnya, revisi Konvensi tahun 1997 (*New Revised Text of 1997*) berlaku pada 2 Oktober 2005 dan sampai dengan November 2006, negara peserta Konvensi berjumlah 159.

Prinsip-Prinsip Umum (*General Principles*)

Dalam Konvensi berlaku prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hukum internasional antara lain:

- Prinsip *pacta sunt servanda*, dimana setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan oleh negara pesertanya dengan itikad baik. Hal ini merupakan dasar timbulnya kewajiban bagi negara peserta Konvensi untuk membentuk pengaturan dan kelembagaan di tingkat nasional dan kewajiban untuk mematuhi standar-standar internasional.
- Prinsip kedaulatan negara (*sovereignty*), di mana setiap negara berdaulat memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal dalam wilayahnya masing-masing. Kewajiban untuk

menerapkan materi Konvensi di tingkat nasional dilakukan dengan tetap menghormati kedaulatan tiap-tiap negara.

- *Precautionary principles*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kebijakan atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan besar bagi masyarakat atau lingkungan hidup harus diatur meskipun belum ada bukti ilmiah yang cukup. Prinsip ini biasanya diterapkan dalam bidang lingkungan hidup dan kesehatan, termasuk dalam kesehatan tanaman sebagaimana tercantum dalam materi Konvensi.

Materi Pokok (Main Features)

Konvensi hasil revisi tahun 1997 memuat 23 *articles* dan dua *annex* yaitu meliputi *Model Phytosanitary Certificate* dan *Model Phytosanitary Certificate for Re-Export*. Hal ini merupakan penambahan dari Konvensi sebelum revisi yang disepakati pada tahun 1951 dan amandemennya di tahun 1979 dimana dimuat 15 *articles* dengan 1 *annex*. Konvensi ini tidak mengelompokkan *articles* ke dalam bagian (*chapter*). *Article 1* Konvensi memberikan kewajiban terhadap negara peserta untuk mengadopsi langkah legislatif, teknis, dan administratif sesuai dengan materi Konvensi dalam rangka memenuhi tujuan Konvensi. Negara peserta memiliki kewajiban melakukan langkah-langkah tersebut dalam wilayah teritorialnya masing-masing. *Article 2* Konvensi memberikan definisi atas penggunaan istilah yang diperluas dalam revisi tahun 1997. Istilah yang dijelaskan meliputi *area of low pest prevalence*, *commission*, *endangered area*, *establishment*, *harmonized phytosanitary measures*, *international standards*, *introduction*, *pest*, *pest risk analysis*, *phytosanitary measure*, *plant products*, *plants*, *quarantined pest*, *regional standards*, *regulated article*, *regulated non-quarantine pest*, *regulated pest*, *secretary*, dan *technically justified*. Kemudian dalam *Article 3* mengenai hubungan dengan perjanjian internasional lain yang terkait menjelaskan bahwa Konvensi tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional lain.

Article 4 memberikan ketentuan umum yang berkaitan dengan penyusunan organisasi tingkat nasional yang melakukan perlin-

dungan tanaman (*National Plant Protection Organizations/ NPPOs*). Setiap negara peserta berkewajiban untuk membentuk organisasi ini dalam wilayahnya masing-masing yang memiliki fungsi untuk melakukan hal-hal berikut ini.

- Penerbitan sertifikat terkait dengan pengaturan *phytosanitary* terhadap pengangkutan tanaman, produk tanaman, serta *regulated articles* lainnya yang dilakukan oleh negara peserta dalam kegiatan impor. (*Regulated articles* lain adalah setiap tanaman, produk tanaman, tempat penyimpanan, pengemasan, pengangkutan, kontainer, tanah, atau organisme lain yang dapat menyebarkan hama dan penyakit terutama berkaitan dengan perdagangan internasional sehingga membutuhkan langkah-langkah *phytosanitary*).
- Survei dan pengamatan terhadap tanaman yang masih hidup, baik tanaman yang dibudidayakan (seperti perkebunan, rumah kaca, atau laboratorium), maupun tanaman liar. Pengamatan harus ditindaklanjuti dengan kerjasama internasional terutama apabila ditemukan adanya penyebaran hama atau penyakit.
- Melakukan inspeksi terhadap tanaman, produk tanaman, serta *regulated articles* lain dalam lalu-lintas barang internasional dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit dan hama.
- Melakukan pengecekan terhadap tanaman-tanaman dalam lalu lintas internasional agar sesuai dengan standar *phytosanitary*.
- Melakukan perlindungan dan pengelolaan wilayah di *endangered areas*, *low pest prevalence*, dan *pest free areas*.
- Melakukan *pest risk analysis*.
- Menjamin berjalannya prosedur keamanan *phytosanitary* dalam pengangkutan barang pada saat ekspor, termasuk setelah sertifikasi dilakukan.
- Pelatihan dan pengembangan staf.

Susunan organisasi nasional di masing-masing negara harus dilaporkan ke Sekretariat *Commision of Phytosanitary Measures* (CPM) dan dapat dipublikasikan kepada negara peserta lainnya apabila diminta.

Article 5 mengatur mengenai salah satu pokok Konvensi, yaitu *phytosanitary certification*. Setiap negara peserta diwajibkan

menerbitkan *phytosanitary certification* dengan tujuan untuk memastikan setiap tanaman atau produk tanaman yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan *phytosanitary* yang berlaku secara internasional. Adapun persyaratan tersebut:

- Inspeksi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbitan *phytosanitary certificates* hanya boleh dilakukan oleh organisasi nasional perlindungan tanaman (NPPO). Penerbitan ini harus dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki kualifikasi teknis, pengetahuan, dan informasi yang memadai dan juga diberikan kuasa oleh NPPO sehingga dapat dipercaya oleh negara pengimpor tanaman yang menerima dokumen *phytosanitary certificates*.
- *Phytosanitary certificates* yang diterbitkan harus sesuai dengan standar internasional dengan format sebagaimana tercantum dalam *annex* Konvensi.
- Adanya perubahan yang tidak disepakati sebelumnya menyebabkan *certificates* tidak sah.

Article 6 membahas mengenai pengaturan hama (*pests*). Negara peserta diwajibkan melakukan langkah-langkah *phyto-sanitary* terhadap hama yang dikarantina maupun hama tidak dikarantina yang diatur (*regulated non-quarantine pests*) sebagai berikut.

- Pengaturan tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan pengaturan terhadap hama sejenis apabila dilakukan di wilayah negara pengimpor.
- Pengaturan hanya terbatas sepanjang diperlukan dan dimaksudkan untuk melindungi kesehatan tanaman dan dapat dibenarkan secara teknis (*technically justified*) oleh negara peserta lain yang berkepentingan (negara pengimpor).

Article 7 membahas mengenai pengaturan yang berkaitan dengan impor tanaman. Dengan tujuan menghalangi penyebaran hama dan penyakit, setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur, sesuai dengan perjanjian internasional, arus keluar-masuk tanaman sebagai berikut.

- merumuskan dan mengadopsi langkah-langkah *phytosanitary* yang berkaitan dengan impor tanaman, produk tanaman, serta *regulated articles* lain termasuk langkah inspeksi dan pemberlakuan larangan impor.
- Melarang masuk, menahan, memberikan perlakuan khusus, menghancurkan, atau memindahkan tanaman, produk tanaman, pengangkutan, atau hal-hal lain yang diatur dalam Konvensi apabila tidak memenuhi langkah *phytosanitary* yang telah dirumuskan tersebut.
- Melarang atau menghambat pergerakan hama yang diatur (*regulated pests*) masuk ke dalam wilayah negaranya.
- Melarang atau menghambat masuknya pergerakan agen kontrol biologis atau organisme *phytosanitary* lainnya yang diklaim bermanfaat ke dalam wilayahnya.

Agar sesuai dan tidak menghambat perdagangan internasional, langkah-langkah sebagaimana dapat dilakukan oleh negara peserta harus sesuai dengan pengaturan berikut ini.

- Pengaturan *phytosanitary* yang diberlakukan oleh suatu negara hanya dilakukan sepanjang diperlukan dan sesuai dengan pertimbangan *phytosanitary* dan dapat dijustifikasi secara teknis.
- Negara peserta harus mempublikasikan langkah-langkah *phytosanitary* yang diadopsi termasuk persyaratan *phytosanitary*, larangan, dan pembatasan yang berkaitan dengan langkah-langkah tersebut.
- Apabila diminta, setiap negara dapat memberikan penjelasan atau latar belakang (*rationale*) atas persyaratan, larangan, dan pembatasan yang diberikan kepada negara lain.
- Apabila negara peserta memberlakukan pengaturan bahwa pengangkutan tanaman atau produk tanaman hanya dapat dilakukan melalui titik masuk tertentu, pengaturan tersebut tidak boleh menghambat perdagangan internasional. Negara peserta harus mempublikasikan titik-titik masuk tersebut dan disampaikan kepada Sekretariat *Commission on Phytosanitary Measures* (CPM), organisasi regional perlindungan tanaman (*Regional Plant Protection Organization/ RPPOs*) dimana

negara tersebut menjadi anggota, negara yang terpengaruh dengan pengaturan tersebut, dan negara lain yang meminta. Pembatasan terhadap titik masuk hanya dapat dilakukan apabila tanaman atau produk tanaman disertai dengan *phytosanitary certificates* yang diserahkan pada saat inspeksi.

- Inspeksi atau prosedur *phytosanitary* yang dipersyaratkan oleh organisasi perlindungan tanaman nasional terhadap tanaman, produk tanaman, atau *regulated articles* dalam kegiatan impor harus dilakukan secepat mungkin.
- Negara pengimpor harus memberikan penjelasan kepada negara pengekspor atau negara yang melakukan *re-exporting* terhadap adanya ketidakpatuhan terhadap *phytosanitary certification* dengan cepat, dan negara pengekspor dapat melakukan investigasi atau meminta hasil investigasi negara pengimpor.
- Negara peserta hanya dapat memberlakukan langkah *phytosanitary* yang *technically justified*, konsisten dengan resiko penyebaran hama, dan memiliki dampak minimal terhadap pergerakan barang dan komoditas.
- Apabila terdapat perubahan situasi dan muncul fakta-fakta baru, negara peserta dapat mengubah atau mengganti dengan cepat langkah-langkah *phytosanitary*.
- Negara peserta sesuai dengan kemampuannya melakukan pengamatan terhadap hama dan mengembangkan informasi terhadap status-status hama untuk mendukung kategorisasi hama dan dalam rangka terus meningkatkan langkah-langkah *phytosanitary*. Informasi harus tersedia juga bagi negara peserta lain.

Langkah-langkah demikian tidak menghalangi negara peserta untuk membuat pengaturan khusus, sepanjang memenuhi *safeguards*, untuk tujuan impor, penelitian ilmiah, pendidikan, atau tujuan spesifik lainnya dari tanaman, produk tanaman, serta *regulated articles* lainnya. Begitu pula langkah-langkah *phytosanitary* tidak dapat menghalangi negara peserta dalam melakukan langkah darurat apabila terdeteksi masuknya hama ke dalam wilayahnya.

Mekanisme Khusus (*Special Mechanism*)

Mekanisme khusus pada Konvensi ini berada pada hubungannya dengan perjanjian internasional lain yang berkaitan. Sesuai dengan *article 14*, Konvensi menghapus dan menggantikan, diantara negara peserta, Konvensi Bern mengenai *Phylloxera* dan Konvensi Paris tahun 1929 mengenai *Protection of Plants*. Selain itu negara peserta dalam rangka memberikan perhatian khusus terhadap suatu masalah tertentu dapat membentuk perjanjian tambahan (*supplementary agreements*). Sesuai *article 16*, Perjanjian demikian dapat diterapkan untuk suatu wilayah, hama, tanaman, produk tanaman, dan metode transportasi tertentu saja. Keberlakuan *supplementary agreements* akan diatur berdasarkan perjanjian yang bersangkutan.

Otoritas dan Pengawasan (*Authority and Monitoring*)

Otoritas dan pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip kerjasama internasional sebagaimana diatur dalam *article 8*. Kerjasama internasional dilakukan untuk mengkoordinasikan pertukaran informasi terhadap hama tanaman, terutama laporan penyebaran yang dapat menjadi bahaya potensial, penyediaan bantuan teknis dan informasi biologis untuk menganalisis resiko hama, dan saling berpartisipasi dalam pemberantasan hama yang mengancam produksi tanaman global. Untuk itu, berdasarkan *article 11* dibentuk *Commission on Phytosanitary Measures (CPM)* yang bernaung dalam kerangka FAO dengan tujuan memastikan implementasi dari Konvensi berikut kebijakan lainnya sebagai wujud tindak lanjut. CPM berfungsi untuk mengendalikan pengaturan perlindungan tanaman di tingkat nasional dan mencegah penyebaran hama dan penyakit di tingkat internasional. Kemudian, CPM berwenang mengembangkan standar-standar internasional mengenai *phytosanitary*, bekerjasama dengan organisasi internasional lain sepanjang berkaitan dengan tujuan Konvensi, serta membuat rekomendasi dalam memenuhi tujuan utama dari Konvensi. Salah satu fungsi utama dari CPM sebagaimana diatur dalam *article 10* adalah mengembangkan dan mengadopsi standar internasional mengenai perlindungan tanaman yang harus diataati

oleh negara peserta. Sesuai dengan *article 12*, sekretariat CPM ditunjuk oleh *Director-General* FAO dan memiliki kewajiban untuk mempublikasikan standar internasional yang berlaku bagi negara peserta, daftar hama yang diatur (*regulated pests*), dan segala informasi yang berkaitan dengan persyaratan *phytosanitary*.

Keberadaan CPM juga ditindaklanjuti dalam *article 9* dimana dimungkinkan kerjasama regional dengan membentuk organisasi regional perlindungan tanaman (RPPOs). Organisasi ini berfungsi sebagai lembaga koordinasi regional yang juga akan berkoordinasi dengan Sekretariat CPM, misalnya dengan menggelar pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan organisasi regional dalam membahas perkembangan langkah-langkah *phytosanitary* terbaru. Standar regional tetap dapat diberlakukan oleh organisasi semacam ini sepanjang tidak bertentangan dengan Konvensi dan harus didepositkan ke CPM.

Perjanjian Internasional yang terkait (*Related Agreements*)

Konvensi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan *SPS Agreement* dalam kerangka WTO. Konvensi ini memang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun standar internasional yang dikembangkan oleh Konvensi tidak. Oleh karena itu, anggota WTO mencari harmonisasi antara kedua perjanjian internasional ini dengan mensyaratkan setiap anggota WTO mendasarkan langkah-langkah *phytosanitary* dalam perdagangan internasional berdasarkan Konvensi. Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa disinkronisasi juga mekanismenya dengan prosedur penyelesaian sengketa di WTO.

Penyelesaian Sengketa (*Settlement of Disputes*)

Mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat interpretasi atau implementasi Konvensi diatur dalam *article 13* mengenai *Settlement of Disputes*. Sengketa antar negara juga dapat timbul akibat langkah-langkah yang dilakukan suatu negara terkait dengan penerapan *phytosanitary certification* yang diatur dalam *article 5* atau berkaitan dengan larangan dan pembatasan impor sebagaimana tercantum dalam *article 7*. Negara yang bersengketa harus mengupayakan penyelesaian melalui konsultasi diantara para

pihak. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, negara peserta dapat meminta *Director-General* FAO untuk menunjuk komite ahli untuk menyelesaikan masalah yang disengketakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh CPM. Komite ini harus beranggotakan perwakilan dari negara yang bersengketa. Dengan menggunakan segala dokumen dan alat bukti yang diserahkan oleh masing-masing negara, komite ahli akan menghasilkan laporan menyangkut aspek teknis dari sengketa dalam upaya menghasilkan resolusi. Laporan ini kemudian disetujui sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh CPM, lalu diserahkan kepada negara yang bersengketa oleh *Director-General* FAO. Laporan ini juga dapat diserahkan kepada badan dari organisasi internasional yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional (dalam hal ini *WTO Dispute Settlement Body*) untuk melengkapi prosedur penyelesaian sengketa di organisasi tersebut. Meskipun demikian, rekomendasi dari komite tidak memiliki kekuatan mengikat dan hanya menjadi dasar pertimbangan negara yang bersengketa untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. (M. Ajisatria).